

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
INOVASI DESA (PID) DI DESA MAGERSARI KECAMATAN
PATEBON KABUPATEN KENDAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Oleh:

Siti Ani Munasaroh

1501046002

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Ani Munasaroh
NIM : 1501046002
Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jurusan/ Konsentrasi : PMI/ Kesehatan Lingkungan
Judul : **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program
Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan
Patebon Kabupaten Kendal**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

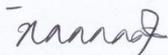
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 Desember 2019

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi dan tata Tulis



Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I, M.Si
NIP 19800816 200710 1 003



Drs. H. Kasmuri, M.Ag
NIP 19660822 199403 1 003

PENGESAHAN

SKRIPSI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM INOVASI
DESA (PID) DI DESA MAGERSARI KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL

Disusun Oleh:

Siti Ani Munasaroh
1501046002

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 20 Desember 2019 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

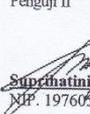
Ketua Sidang


Substio, S.Ag, M.Si
NIP. 19700202 199803 1 005
Penguji I

Sekretaris Sidang

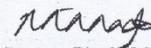

Drs. Kasmuri, M.Ag
NIP. 19660822 199403 1 003
Penguji II


Ahmad Fachri, S.Ag, MSI
NIP. 19730308 199703 1 004


Suprhatiningsih, S.Ag, M.Si
NIP. 19760510 200501 2 001

Mengetahui

Pembimbing I


Dr. Agus Rivadi, S.Sos.L, M.S.I
NIP. 19800816 200710 0 001

Pembimbing II


Drs. Kasmuri, M.Ag
NIP. 19660822 199403 1 003

Ditandatangani dan disahkan oleh
Dewan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal 26 Desember 2019


Dr. H. Niyas Supena, M.Ag
NIP. 19720410 200112 1 003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dilembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 3 Desember 2019




Siti Ani Munasaroh
NIM.1501046002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Inovasi Desa di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.”** Shalawat beriring salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. beserta Keluarga, para sahabat, dan semoga kita termasuk umatnya sampai akhir hayat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ilyas Supena M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Sulistio, S.Ag. M.Si. dan Bapak Dr. Hatta Abdul Malik, S.Sos.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Walisongo Semarang yang

telah memberikan kelancaran di dalam proses penelitian ini.

4. Bapak Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I, M.S.I selaku pembimbing I sekaligus wali dosen dan Bapak Drs. H. Kasmuri, M.Ag selaku pembimbing II yang berkenan mengarahkan dan membimbing skripsi saya hingga akhir.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
6. Bapak dan ibu pegawai di lingkungan FDK, pegawai di perpustakaan FDK dan UIN Walisongo, dan pegawai pada umumnya, atas layanannya.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DISPERMASDES) Kabupaten Kendal atas ijin rekomendasi penelitian.
8. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Kendal, khususnya Mas Artanu Damasji atas dukungan materi dan semangatnya untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Bapak Kepala Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal atas ijin dan bantuan untuk penelitian.
10. Bapak Sudarmadi, Ibu Haryanti, dan Mbak Nur dan adik Niswah berserta keluarga atas segala doa, kasih sayang, dan segala dukungannya.
11. Keluarga besar mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, khususnya angkatan 2015 atas semangat, suka dan duka di masa-masa perkuliahan. Serta kakak angkatan 2014 dan adik

angkatan yang memberikan dukungan.

12. Sahabat-sahabat ku yang selalu aku cintai, Nova Nur Safitri, Rika Apsari, Miftahchul Mukaromah dan Ainis Shofwah yang selalu mau membantuku dalam kesusahan, sertakeluarga besar PMI-A 2015.
13. Seseorang yang selalu mendukung dan bersamaku dalam keadaan apapun Deza Cholis Niwata Huda.
14. Semua pihak dalam perjalanan hidup telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT menyayangi, mengabulkan doa dan citakalian.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang umumnya. *Aamiin*.

Semarang, 3 Desember 2019

Siti Ani Munasaroh

PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini kupersembahkan sebagai wujud ungkapan terima kasih yang mendalam kepada:

Bapak Sudarmadi dan Ibu Haryanti atas ridho dan restunya.

Mbak Nur dan Adik Niswah beserta keluarga atas kasih sayangnya kepadaku

Keluarga besar dari garis bapak dan ibu atas dorongan dan semangat demi keberhasilanku

Bapak dan Ibu guru Dosen yang mengajarkan berbagai ilmu dengan ikhlas

Teman-teman seperjuangan di PMI angkatan 2015.

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islma Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang sebagai almamater tercinta.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥٦﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥٧﴾

*“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”* (Q.S Al Insyirah 5-

6)

ABSTRAK

Siti Ani Munasarroh (1501046002), "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) Di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal*". Program Inovasi Desa merupakan upaya membangun desa dengan pemberdayaan masyarakat yang terfokus dalam tiga sasaran program. Sasaran fokus Program Inovasi desa adalah pengembangan ekonomi lokal, kewirausahaan, dan peningkatan sumber daya manusia. Sasaran program ini dikembangkan untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa agar tidak terfokus pada infrastruktur fisik, yang selama ini kurang memperhatikan kebutuhan ekonomi lokal dan kewirausahaan masyarakat. Di Desa Magersari salah satunya, dimana sebelum ada PID pembangunan di Magersari hanya fokus pada pembuatan rabat beton, pavingisasi dan talud tanpa memperhatikan kebutuhan kesejahteraan masyarakat dan potensi perekonomian yang ada.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana tahapan pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, (2) Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dari pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendiskripsikan mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat dalam Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, (2) Bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan tahap analisa data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tahap sebelum di lapangan, tahap selama di lapangan, dan tahap kesimpulan/verifikasi data.

Hasil dari penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) Di Desa Magersari adalah melalui beberapa tahapan yaitu: (a) Tahap penyadaran, (b) Tahap Pengkapasitasan, (c) Tahap Pendayaan, (d) Tahap *capacity building* dan

networking, (5) Tahap evaluasi dan monitoring. Adapun Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat melalui PID salah satunya dukungan dan perhatian penuh dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan sebagai Peluang untuk masyarakat agar lebih memanfaatkan dana desa (DD) dengan kegiatan yang lebih inovatif, Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui PID yaitu, Proses sosialisasi informasi dan inovasi PID sangat singkat dan Kebijakan pemerintah Desa Magersari yang masih terfokus pada pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat akan kesejahteraan dan pemberdayaan.

Kata Kunci: Pemberdayaan , Program Inovasi, Desa Magersari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	19
2. Definisi Konseptual	19
3. Sumber dan Jenis Data.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23

5. Teknik Analisis Data	26
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pemberdayaan Masyarakat	29
1. Pengertian Pemberdayaan	29
2. Tujuan Pemberdayaan	33
3. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	35
4. Metode Pemberdayaan Masyarakat.....	40
5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	44
6. Indikator Pemberdayaan.....	46
7. Strategi dan Pendekatan	48
B. Program Inovasi Desa (PID)	49
1. Pengertian Program Inovasi Desa (PID)	49
2. Tujuan Program Inovasi Desa (PID)	52
3. Lokasi dan Alokasi PID	53
4. Sasaran Program Inovasi Desa (PID).....	54
5. Prinsip Program Inovasi Desa (PID)	54
6. Pelaku Program Inovasi Desa (PID).....	56
7. Tahapan Pelaksanaan (PID)	79
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM INOVASI DESA (PID)	
A. Gambaran Umum Desa Magersari.....	87
1. Keadaan Geografis	87
2. Keadaan Demografis	88

3. Keadaan Sosial dan Kepercayaan	92
4. Potensi Desa	93
B. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PID di Desa Magersari	95
1. Tahap Penyadaran	96
2. Tahap Pengkapasitasan.....	99
3. Tahap Pendayaan.....	103
4. Tahap <i>Networking</i>	112
5. Tahap Evaluasi	113
C. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	114
1. Faktor Pendukung	114
2. Faktor Penghambat.....	116
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari.....	119
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat.....	142
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	148
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.** Peta Desa Magersari Kecamatan Patebon
- Gambar 2.** Alur pelaksanaan Pogram Inovasi Desa (PID)
- Gambar 3.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Magersari Tahun 2019 Bidang pemberdayaan masyarakat
- Gambar 4** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Magersari Tahun 2019 Bidang pelaksanaan pembangunan
desa
- Gambar 5** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Magersari Tahun 2019 Bidang pelaksanaan pembangunan
desa
- Gambar 6** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Magersari Tahun 2019 Bidang pemberdayaan masyarakat
Kegiatan Pelatihan pengadaan dan pengelolaan BUMDes

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel 4. Hasil analisis SWOT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan wilayah terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa, meningkatkan kapasitas finansial desa melalui Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) sehingga desa dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan. Upaya Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan anggaran dana yang tersedia melainkan juga pengentasan masalah kemiskinan. Kemiskinan Sebagai suatu permasalahan yang disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: kualitas SDM masyarakat yang relatif rendah, masyarakat yang tidak berdaya, potensi alam di pedesaan yang belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dalam pengelolaan dan minimnya sumber daya untuk mendorong potensi yang tersedia (Nurcholis 2011:4).

Kemiskinan di pedesaan merupakan suatu masalah pokok yang harus diselesaikan dan harus diprioritaskan dalam melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 25,95 juta penduduk. Berdasarkan jumlah tersebut,

sebanyak 61,32 % atau secara *absolute* sebesar 15,99 juta penduduk diantaranya bertempat tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan data Bappenas, penyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia didominasi oleh masyarakat yang hidup di pedesaan (Bappenas, 2018). Desa juga identik dengan keterbelakangan dan penumpukan angkatan kerja produktif yang menganggur. Berdasarkan fakta di atas pemerintah semakin serius untuk menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan membangun desa.

Upaya pengentasan kemiskinan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengubah perilaku dengan mendorong masyarakat desa untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak di atas kakinya sendiri, memiliki daya saing serta mandiri melalui berbagai kegiatan pemberdayaan (Anwas, 2014: 3). Hal ini didukung dengan pernyataan menurut Menurut Zubaedi, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adalah untuk membangun suatu struktur masyarakat. Di mana Pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu- individu yang mengalami kemiskinan (Zubaedi, 2014:35).

Pemberdayaan sebagai suatu tujuan, Pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Zubaedi, 2014:35).

Pemberdayaan merupakan aspek muamalah yang sangat penting karena terkait dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Alqur'an menjelaskan tentang betapa pentingnya perubahan, salah satunya yaitu melalui pemberdayaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Ra'ad : 11.

لَهُمْ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
 سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya:”bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah memberi kekuatan dan akal budi kepada manusia sehingga manusia dapat bertindak sendiri dan mengendalikan dirinya sendiri di bawah naungan

Allah.sebab itu manusia mempunyai kewajiban untuk berusaha sendiri untuk menentukan garis hidupnya, jangan hanya menyerahkan tidak mau berikhtiar. manusia bukan semacam kapas yang mudah diterbangkan oleh angin manusia diberikan akal oleh Allah untuk berpikir dan kekuatan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik berdasarkan batasan yang ditentukan oleh Allah, oleh sebab itu manusia diberi kehormatan khalifah di bumi (Hamka, 1983: 73).

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Quraisy Shihab (2012: 63) bahwa Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum dari positif menuju negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif sampai mereka mengubah terlebih dahulu apa yang ada pada diri mereka, Yani sikap mental dan pikiran mereka sendiri. Ayat ini juga dilanjutkan bahwa apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka berlakulah hukum dan ketentuanNya, Yani yang berdasarkan pada sunnatullah atau hukum hukum ke masyarakatan yang ditetapkanNya, dan apabila itu terjadi tidak ada yang bisa menolaknya dan tidak ada perlindungan baginya kecuali Allah (Shihab, 2012: 63).

Berdasarkan penjelasan ayat di atas kegiatan pemberdayaan atau pengembangan masyarakat merupakan salah satu bentuk *kegiatan dakwah bil hal* yang bertujuan untuk mengajak perubahan pada suatu masyarakat yang pada mulanya buruk menjadi lebih baik hal ini bisa dilihat dalam serangkaian proses kegiatan pemberdayaan

yang mengarah pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan. Dari proses pemberdayaan tersebut diharapkan dapat mengubah kondisi masyarakat mulai dari sikap, gaya hidup, pola pikir, dan kesadaran bermasyarakat.

Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah adalah salah satunya melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Kemendesa terus berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pemberian Dana Desa sebagai perwujudan agenda Nawa Cita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya Kemendesa PPDT untuk meningkatkan kapasitas Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengembangkan rencana dan melaksanakan pembangunan Desa secara berkualitas agar dapat meningkatkan produktivitas rakyat dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan sumberdaya yang memiliki daya saing (PTO PID, 2018: 2).

Peningkatan kapasitas Desa dalam PID dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) dan mempersiapkan lembaga Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) untuk membantu pembangunan desa dengan fokus pada bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumberdaya Manusia, dan Infrastruktur Desa, yang

sejalan dengan program prioritas Kemendesa PDTT dalam meningkatkan produktivitas desa (PTO PID, 2018: 3).

Tujuan utama Program Inovasi Desa Menurut KEMENDESA PDTT No.48 Tahun 2018 adalah untuk mendorong pembangunan Desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa sehingga dalam hal ini, upaya ini dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan secara berkelanjutan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian desa. Salah satunya dilaksanakan di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

Desa Magersari sendiri merupakan salah satu desa terkecil yang berada di Kecamatan Patebon Kabupaten kendal dengan penduduk sebesar 1.639 jiwa. Letak Desa Magersari yang berada di pesisir pantai yang merupakan hilir dari sungai Bodri menyebabkan hampir seluruh warga bermata pencaharian sebagai nelayan. Pemerintah Desa Magersari melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang telah yang melakukan replikasi inovasi melalui bursa inovasi dalam Program Inovasi Desa mulai menggerakkan masyarakat Magersari yang pada awalnya hanya bermata pencaharian sebagai nelayan untuk lebih berinovasi melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan ekonomi lokal dan infrastruktur dasar.

Program Inovasi Desa merupakan upaya membangun desa dengan pemberdayaan masyarakat yang terfokus dalam tiga sasaran program. Sasaran fokus Program Inovasi desa adalah pengembangan ekonomi lokal, kewirausahaan, dan peningkatan sumber daya manusia. Sasaran program ini dikembangkan untuk mengoptimalan penggunaan dana desa agar tidak terfokus pada infrastruktur fisik, yang selama ini kurang memperhatikan kebutuhan ekonomi lokal dan kewirausahaan masyarakat. Desa Magersari masih memiliki permasalahan antara lain penggunaan dana desa yang hanya terfokus pada pembangunan infrastuktur seperti pembangunan rabat beton, pavingisasi, dan pembuatan talud tanpa memperhatikan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Masalah lain yang ada di Desa Magersari yaitu potensi masyarakat desa yang kurang dikembangkan, Potensi wisata yang belum di maksimalkan dan Pengangguran di usia produktif.

Menurut Bapak Muhyidin selaku Kepala Desa Magersari, selama ini penggunaan dana desa hanya berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur desa tanpa memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Magesari sendiri. Dengan adanya Program Inovasi Desa dari KEMENDESA PDDT. Pemerintah Desa Magersari berusaha memberdayakan masyarakat dengan mengembangkan potensi-potensi desa yang ada dan menjadikan Desa Magersari sebagai salah satu desa sentra seni di Kecamatan Patebon

Kabupaten Kendal (Hasil wawancara Pada: Senin, Jum'at 3 Mei 2019).

Menurut APBDes 2018 di Desa Magersari penggunaan dana desa (DD) pada tahun 2018 sebesar Rp. 706.182.000.00,- hanya fokus dengan pembangunan infrastruktur yaitu pembuatan rabat beton dan talut tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat (Siskeudes 2018). Hal ini menjadikan masyarakat kurang merasakan hasil penggunaan DD dari pemerintah. hal ini yang menggerakkan pemerintah desa untuk megimplementasikan Program Inovasi Desa (PID) dalam RAPBDes sehingga penggunaan dana desa lebih di fokuskan pada pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan PID dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dengan kebijakan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atas dukungan masyarakat di Desa Magersari. Keberhasilan PID dapat dilihat dalam peningkatan angka penggunaan DD untuk bidang pemberdayaan masyarakat pada APBDes Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 130.105.200,- sedangkan penggunaan DD Tahun 2018 untuk bidang pemberdayaan masyarakat hanya sebesar Rp. 21.200.000,- (Siskeudes 2018, 2019).

Beberapa kegiatan pelatihan sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat desa antara lain, pengolahan sampah terpadu, dimana sampah plastik diolah menjadi hiasan aquarium. Kegiatan pengolahan sampah ini sudah dimulai pada replikasi inovasi tahun 2018 dalam APBdes 2018, kemudian pada APBDes Tahun 2019

fokus untuk pelatihan pemasarannya. Kegiatan lain dalam upaya peningkatan kapasitas dan ekonomi masyarakat adalah pelatihan pemasaran industri rumah tangga pembuatan miniatur kapal. Industri ini awal mulanya sudah ada di Magersari, namun karena keterbatasan warga untuk memasarkan hasil dari karyanya menyebabkan industri ini hanya beroperasi jika ada pesanan.

Dalam pelaksanaan kegiatan hasil dari Program Inovasi Desa (PID) dapat melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk masyarakat. Pendirian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Dimaksudkan untuk melaksanakan tugas desa dalam penyelenggaraan cabang-cabang produksi yang penting bagi desa dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk rakyat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) (Kemenkeu RI, 2017: 97).

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada Hari Senin, 27 Mei 2019 dengan Bu Syhadah Isma selaku pendamping desa di Desa Magersari, menyampaikan bahwa peran BUMDes Berkah Jaya yang

ada di Desa Magersari sangat penting dalam proses penguatan perubahan taraf hidup yang lebih baik untuk pengembangan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Inovasi Desa (PID) bertujuan untuk mengembangkan rencana dan melaksanakan pembangunan Desa secara berkualitas agar dapat meningkatkan produktivitas rakyat dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan sumberdaya yang memiliki daya saing tinggi, dan Desa Magersari merupakan salah satu dari 18 Desa di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang berhasil mengimplementasikan PID dalam pembangunan desanya.

Hal ini menjadi landasan peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang bagaimana pemberdayaan di Desa Magersari melalui Program Inovasi Desa. Penelitian ini diberi judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dari pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengetahui tahapan pemberdayaan masyarakat dalam Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.
2. Bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a) Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu dijadikan untuk pengembangan teori pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa (PID).
 - b) Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Program pemerintah yaitu Program Inovasi Desa (PID).
 - c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang lainnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan penggunaan Dana Desa (DD) secara lebih berkualitas melalui pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa, replikasi dan adopsi kegiatan pembangunan dan membangun masyarakat Desa yang inovatif.
- b) Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa Magersari untuk menentukan proses dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan menentukan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Desa Magersari Kecamatan Patebon kabupaten Kendal.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, skripsi dari Fatimah Zahrotul Hayati yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Vokasi di Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang*” Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penelitian ini di latar belakang oleh tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Untuk menanggulangi peningkatan kemiskinan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) meluncurkan program desa

vokasi. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan keterampilan produksi yang sesuai dengan sumber daya yang ada di kawasan yang diberdayakan. Kelurahan Kedungsari merupakan salah satu kelurahan di Kota Magelang yang mendapatkan bantuan Program Desa Vokasi (Hayati, 2015: 1).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dan hasil yang dicapai dalam pemberdayaan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penggambaran dan menguraikan data secara sistematis. Untuk membantu pengumpulan data, maka peneliti menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan menggunakan metode Miles dan Huberman dimana analisis dilakukan pada saat wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan (Hayati, 2015: 1).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pemberdayaan melalui Program Desa Vokasi yang dilakukan oleh Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang meliputi tahap sosialisasi, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemberian bantuan dan tahap evaluasi. Sedangkan hasil dari pemberdayaan melalui Program Desa Vokasi yaitu meningkatkan

ketrampilan, meningkatkan jiwa kemandirian dan meningkatkan partisipasi anggota kelompok (Hayati, 2015: 1).

Penelitian di atas memiliki kesamaan dalam pembahasan yaitu membahas tentang pemberdayaan masyarakat. Namun penelitian di atas menekankan pada pemberdayaan masyarakat yang diprakarsai oleh Dinas Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan formal (PAUDNI). Sedangkan Program Inovasi Desa (PID) di laksanakan oleh KEMENDesa.

Kedua, Muhammad Ufik Nurhuda dalam skripsi yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat melalui Program CSR (Corporate Social Responsibility) PT Pertamina DPPU Adi Sutjipto di Dusun Nayan Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta*. Penelitian ini dilakukan oleh Ufik di Dusun Nayan Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta. Dalam skripsinya, Ufik membahas tentang strategi dan dampak pemberdayaan masyarakat di Dusun Nayan melalui program CSR PT Pertamina DPPU Adi Sutjipto (Nurhuda, 2015: 1).

Tahapan yang dilalui dalam pemberdayaan tersebut yaitu *enable setting* yang dimulai dengan koordinasi bersama masyarakat tentang budidaya ikan air tawar, *Empowering Local Community* yang diwujudkan dengan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi tentang budidaya ikan air tawar, dan *Socio-Political* yang diwujudkan dengan adanya UPI (Unit Pengolahan Ikan) dan Koperasi Produsen Mino Ngudi Lestari. Sedangkan dampak dari

pemberdayaan tersebut adalah meningkatnya produktifitas panen ikan oleh pembudidaya ikan masyarakat dusun Nayan sehingga kesejahteraan masyarakat terpenuhi. (Nurhuda, 2105: 1).

Penelitian di atas memiliki kesamaan pembahasan yaitu membahas tentang pemberdayaan masyarakat, namun pada penelitian di atas pemberdayaan dilakukan oleh sebuah BUMN. Penelitian di atas lebih menekankan pada strategi pemberdayaan dan dampak pemberdayaan. Sedangkan Penelitian yang penulis lakukan menekankan pada tahapan atau Proses pemberdayaan dan hasil dari pemberdayaan yang telah dicapai di Desa Magersari.

Ketiga, skripsi dari Ratna Ayundari yang berjudul, “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Kelompok Bhakti Manunggal di Dusun Tulung Desa Srihardono Pundong Bantul Yogyakarta*”. Penelitian ini dilakukan oleh Ratna di desa Srihardono Pundong Bantul Yogyakarta. Dalam skripsinya Ratna membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh kelompok Bhakti Manunggal serta dampak yang dihasilkan dari adanya pemberdayaan tersebut. Hasil penelitian ini adalah bahwa kelompok Bhakti Manunggal melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara mandiri dan bekerjasama dengan pemerintah desa Srihardono (Ayundari, 2015:1).

Kegiatan pemberdayaan ekonomi ini diawali dengan penyusunan program, peningkatan sum berdaya manusia, permodalan dan kegiatan usaha pengolahan ketela. Dampak yang

dihasilkan dari pemberdayaan ini ialah dampak positif dan negatif. Dampak positif dari kegiatan pemberdayaan ini antara lain masyarakat Tulung memiliki sumber pendapatan, memiliki kemampuan dalam menyimpan uang, memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan. Sedangkan dampak negatif dari pemberdayaan ini adalah menjadikan hubungan anak dan orang tua yang melakukan kegiatan pemberdayaan menjadi renggang, sebab kurangnya waktu yang dimiliki oleh orang tua.

Penelitian di atas memiliki kesamaan pembahasan yaitu membahas tentang pemberdayaan masyarakat, Namun pada penelitian di atas pemberdayaan dilakukan dari oleh masyarakat itu sendiri, sedangkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa (PID) merupakan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan dinas terkait.

Keempat, skripsi dari Syukron Munjazi yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengurangi kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri) (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)*”. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. hasil dari penelitian tersebut adalah proses pemberdayaan masyarakat parsipatoris yang dilakukan oleh BKM melalui program pinjaman dana bergulir dari dana PNPM-Mandiri yang berdampak positif terhadap penurunan

kemiskinan di Kelurahan Demangan, dan dicapai dari proses panjang yang menggugah partisipasi aktif masyarakat untuk mensukseskan program BKM tersebut. Dan hasilnya dapat menekan angka kemiskinan pada setiap periode yang terjadi di Kelurahan Demangan (Munjazi, 2009: 1).

Penelitian di atas terdapat kesamaan kajian tentang pemberdayaan masyarakat namun obyek, fokus penelitian dan metode yang digunakan berbeda. Pada penelitian di atas merupakan penelitian yang menekankan pada strategi dan dampak dari pemberdayaan terhadap masyarakat. Namun pada penelitian ini akan mengkaji tentang berbagai tahapan-tahapan dalam pemberdayaan dan hasil yang telah dicapai oleh masyarakat tersebut.

Kelima, Skripsi dari Yuyun Maulida yang berjudul *“Efektivitas Program Inovasi Desa Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat”* Program studi ilmu administrasi negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Inovasi Desa dalam mewujudkan Kemandirian Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian pada saat

sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Yuyun, 2018: 1).

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan Program Inovasi Desa Dalam Mewujudkan kemandirian Desa di Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat, belum sepenuhnya berjalan. Program ini sudah berjalan secara tidak disebutkan, cuman belum dibungkus dalam pengertian inovasinya. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat dalam pencapaian tujuan, proses kegiatan, yang dilakukan oleh Bidang Inovasi Desa, serta tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. terkait dari tujuan dan sasaran untuk meningkatkan Kemandirian Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat sudah tercapai begitu pun penataan sasaran dan prasarana yang sudah maksimal. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pencapaian tujuan baik, bagus dengan adanya kerjasama dengan baik, prosedur yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai terealisasi. Sasaran prasarana Program Inovasi Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat belum sepenuhnya terlaksanakan (Yuyun, 2018: 1).

Obyek penelitian di atas memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang program inovasi desa (PID). Perbedaan terletak pada fokus penelitian, penelitian di atas fokus pada

efektivitas PID dalam rangka mewujudkan kemandirian desa, sedangkan penelitian ini fokus pada pemberdayaan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Adapun metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti, termasuk hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari fenomena untuk menentukan hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain (Sugiyono, 2014: 41).

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku didalamnya terdapat upaya untuk medeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada (Mardalis, 1999: 26).

2. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual ini merupakan ini merupakan upaya untuk memperjelas ruang lingkup dan untuk menghindari kesalahan persepsian terhadap penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu:

a) Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai suatu tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

b) Program Inovasi Desa (PID)

PID dilaksanakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi) melalui kerjasama dengan Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi (Satker P3MD Provinsi), dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Petunjuk teknis pelaksanaan PID, 2019: 2).

Pelaksanaan PID didukung dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas desa melalui kegiatan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) dengan fokus pada bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Desa. Pelaksanaan PID terdiri atas 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

- a) Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID), yaitu kegiatan pendokumentasian, penyebarluasan dan pertukaran praktek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dengan tujuan memberikan inspirasi kepada Desa untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pembangunan Desa.
- b) Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) agar Desa mendapatkan jasa layanan teknis yang berkualitas dari lembaga profesional dalam mewujudkan komitmen replikasi atau adopsi inovasi, serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara regular.
- c) Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), dimaksudkan agar masyarakat desa-desa memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan (Petunjuk teknis pelaksanaan PID, 2019: 2).

3. Sumber dan Jenis data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari:

a) Data Primer, yaitu data utama atau data asli yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya. Pada penelitian ini, data primer didapatkan melalui hasil wawancara dengan pelaku Program Inovasi Desa (PID) secara terbuka yang meliputi :

- 1) Bapak Syarif selaku Tim Pelaksana Program Inovasi Desa (TPID).
- 2) Ibu Syahadah Isma selaku pendamping desa di Desa Magersari.
- 3) Bapak Andien selaku pendamping lokal desa di Kecamatan Patebon.
- 4) Bapak Abdul Basit selaku Sekretaris desa di Desa Magersari.
- 5) Bapak Muhyidin selaku kepala Desa Magersari
- 6) Bapak Suratman warga Desa Magersari sebagai warga dan anggota BPD

Adapun kriteria yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Warga Desa Magersari, Tim pelaksana PID, pendamping desa, pendamping lokal desa dan pemerintah desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal berkaitan dan memiliki kapasitas dalam penyampaian informasi.
- 2) memiliki data dan informasi yang dapat dipertanggung

jawabkan dan bersedia untuk di wawancarai.

- b) Data Sekunder, yaitu data yang memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat dan melengkapi data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain, petunjuk teknis pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) tahun 2018 dan tahun 2019, salinan Kemendesa PDTT No. 4 tahun 2019 Tentang Pedoman Program Inovasi Desa (PID), Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Sistem Pembangunan Desa (SiPeDe), Buku pintar Dana Desa dan profil desa dalam Sistem informasi desa (SID).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2012: 224). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, observasi, *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti karena suatu fenomena akan dimengerti maknanya secara baik, apabila peneliti melakukan interaksi dengan subyek penelitian di mana fenomena tersebut berlangsung (Margono, 2003: 159).

a) Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks. Suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi

dapat digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan dimana penelitiannya mengamati secara langsung keadaan obyek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut terlibat langsung (Sugiyono, 2013: 145).

Beberapa hal yang menjadi obyek observasi dalam penelitian ini, diantaranya mencakup keadaan geografis dan kehidupan sosial warga Desa Magersari Kecamatan Patebon, menelaah hasil fisik dari pelaksanaan program PID berupa APBDes 2019, serta mengamati kegiatan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut.

b) Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi, atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian, dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan (Margono, 2003: 159).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara. Maka sebelum melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan- pertanyaan yang diajukan

kepada informan. Namun, pada pelaksanaannya nanti akan disesuaikan dengan keadaan responden. wawancara dilakukan dengan pelaku Program Inovasi Desa (PID) yang meliputi :

- 1) Bapak Abdul Basit selaku Sekretaris Desa (Pak Carik) di Desa Magersari. Untuk mendapatkan informasi mengenai proses sosialisasi dengan masyarakat, seberapa besar partisipasi masyarakat, proses pendekatan yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat dan hasil pengembangan masyarakat melalui PID.
- 2) Bapak Syarif Hidayat selaku Tim Pelaksana Program Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Patebon untuk mendapatkan informasi mengenai sistematika pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID), baik itu pra bursa inovasi, kegiatan bursa inovasi dan pasca kegiatan bursa inovasi.
- 3) Ibu Syahadah Isma selaku pendamping desa di Desa Magersari.
- 4) Bapak Andien selaku pendamping lokal desa di Kecamatan Patebon. Untuk mendapatkan informasi mengenai APBDes Magersari tahun anggaran 2018 dan 2019.
- 5) Bapak Muhyidin selaku Kepala Desa untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan di Desa

Magersari.

- 6) Bapak Suratman warga Desa Magersari yang menjalankan industri pembuatan hiasan aquarium dan anggota BPD.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang memiliki arti barang-barang tertulis. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan (Arikunto, 2002: 135).

Beberapa dokumentasi dalam penelitian ini antara lain, APBDes Magersari 2018, APBDes Magersari 2019, foto kegiatan pelaksanaan APBDes sebagai hasil replikasi PID, yaitu dokumentasi pada berbagai tahapan pelaksanaan dan foto kegiatan bursa inovasi.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif atau berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori (Rahmat, 2009: 5).

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2013: 331) menyatakan bahwa aktifitas dalam analisis

data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas, adapun aktifitas analisis data adalah sebagai berikut:

a) *Data Reduction* (Data Reduksi)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya (Rahmat, 2009: 5). Pada tahap ini penulis merekap hasil wawancara selanjutnya peneliti pilih sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka selanjutnya dengan menyajikan data. Penyajiannya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya (Indrawan. 2014:139). Dengan ini maka akan mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan proses selanjutnya berdasarkan apayang telah dipahami. Pada tahap ini peneliti menyajikan data berkaitan pada pendekatan atau strategi yang digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa

(PID).

c) *Conclusion* (Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2014:252). Pada tahap ini penulis memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan model pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dengan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Theresia A, 2014:115). Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, dan terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi orang lain, memenuhi kebutuhannya, menentukan pilihan-pilihannya, dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya (Theresia A, 2014:117).

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan, kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak, sedangkan pemberdayaan artinya proses, cara, dan nilai perbuatan memberdayakan (KBBI, 2005: 188). Menurut Permendagri No 7 tahun 2007, pemberdayaan adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan

kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (PERMENDAGRI, 2017: 7).

Pemberdayaan masyarakat atau *community development* menurut Soetomo adalah usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah untuk memperbaiki kehidupan komunitas, baik itu sosial, ekonomi maupun kultural kemudian mengintegrasikannya dengan kehidupan nasional sehingga mampu mendorong kemajuan nasional (Soetomo, 2010: 79).

Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan perilaku kearah kemandirian (berdaya). Tujuan utamanya yaitu untuk perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya ataupun pendidikan (Theresia A, 2014:115).

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang (*enabling*). Menurut Winarni sebagaimana dikutip dalam Bhinadi (2012: 24) mengemukakan pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak

menyadari atau daya tersebut masih eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. Disamping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaiknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

Dengan demikian, target dan tujuan pemberdayaan itu bisa saja berbeda sesuai dengan pemberdayaan yang dilakukan. Menurut Jim Ife (Ife, 2008:60-64) seorang agen pemberdaya harus mengetahui faktor penyebab ketidakberdayaan suatu masyarakat. Seperti: karena tidak memiliki kekuatan (kekuatan atas pilihannya sendiri, kekuatan untuk menentukan kebutuhannya sendiri, kekuatan dalam kebebasan berekspresi, kekuatan kelembagaan, kekuatan sumberdaya ekonomi, serta kekuatan dalam hal reproduksi), karena adanya ketimpangan struktural, sosial, usia, agama dan budaya. Sehingga pelaksanaan program-program pemberdayaan merupakan upaya merubah strata sosial kearah yang lebih baik dengan sasaran pokok menciptakan kesejahteraan masyarakat. Upaya meningkatkan kesejahteraan tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur saja melainkan pengentasan masalah kemiskinan.

Kemiskinan sebagai suatu permasalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: kualitas SDM masyarakat yang relatif rendah, masyarakat yang tidak berdaya, potensi alam belum dioptimalkan dengan baik serta potensi masyarakat kurang dimaksimalkan sehingga kurangnya inovasi dan motivasi untuk berkembang. Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat menjadi upaya penting dalam mendorong masyarakat desa untuk memiliki kemampuan dan memenuhi kebutuhannya dan berdiri tegak di atas kakinya sendiri (berdikari), memiliki daya saing serta mandiri.

Selain itu pemberdayaan masyarakat merupakan proses penyadaran dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 122:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Artinya: ” tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

Menurut Imam Abu Ja'far Muhammad Bin Jarit At-Thobari menjelaskan bahwa kewajiban seorang muslim untuk bertanggung jawab atas keadaan umat yang ada disekitarnya. Karena pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah amanah dari kesadaran sosial. Sehingga tidak berlebihan apabila membangun ruh keilmuan dan peradaban masyarakat merupakan sebuah keharusan yang menjadi lahan implementasi nyata dari tanggungjawabnya sebagai *Kholifatu Fil Ard* (Hamka,1983).

2. Tujuan Pemberdayaan

Sebuah program pasti mempunyai tujuan, begitu juga dengan pemberdayaan masyarakat. Tujuan inilah yang nantinya akan mengantarkan seorang pemberdaya masyarakat untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (PERMENDAGRI, 2017: 7).

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Adisasmita (2013: 78) yaitu untuk membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integrasi dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil serta memperdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka namun sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Wrihatnolo sebagaimana dikutip oleh Aziz Muslim (2012: 28) tujuan pemberdayaan masyarakat ialah mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Sejalan dengan konsep yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto sebagaimana dikutip oleh Aziz Muslim (2018: 29) adalah:

- 1) Bina manusia, hal ini dikarenakan tujuan utama dari pengembangan masyarakat ialah untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas individu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas sistem demi mencapai kesejahteraan manusia itu sendiri.
- 2) Bina usaha, adalah upaya yang diberikan dalam proses pengembangan masyarakat demi mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat sebagai dampak atau manfaat dari proses perbaikan masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya berjuang melainkan mampu merasakan dampak dari perjuangan mereka sendiri.
- 3) Bina lingkungan, hal ini lebih berkaitan dengan ketersediaan bahan baku atau sumber daya alam dan lingkungan sosial yang menopang terjadinya proses pemberdayaan.
- 4) Bina kelembagaan, dengan kelembagaan yang baik diharapkan masyarakat dapat terorganisir dengan baik

pula, begitu juga dengan proses pembinaan manusia, usaha dan lingkungan harus didukung dengan adanya sistem atau kelembagaan yang baik pula sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal.

Adapun tujuan memperdayakan masyarakat lemah yaitu:

- 1) Pemungkinan yaitu suatu cara untuk menciptakan suasana atau iklim yang mengembangkan potensi masyarakat secara optimal.
- 2) Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan keimanan masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi.
- 3) Perlindungan yaitu untuk melindungi masyarakat lemah dari penindasan masyarakat kuat, atau menghindari eksploitasi sumber daya alam maupun sumberdaya manusia.
- 4) Penyokongan yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peran dan tugas-tugasnya dalam kehidupan sosial.
- 5) Pemeliharaan yaitu menjaga lingkungan agar tetap kondusif dan seimbang antara kelompok kaya dengan kelompok miskin.
- 6) Pendampingan yaitu mendampingi masyarakat secara utuh agar bisa berdikari (Tomi Hendra, 2017: 191-193)

3. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan

melaksanakan kegiatan secara konsisten, oleh karena itu prinsip harus bersifat umum, dapat diterima secara umum dan diakui dan diyakini kebenarannya dari berbagai pengalaman dan kondisi yang beragam. dengan demikian prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi pelaksana kegiatan yang akan dilaksanakan. seorang penyuluh atau fasilitator yang baik yaitu harus berpegang pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan, karena jika fasilitator tidak berpegang pada prinsip pemberdayaan tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Adapun menurut Mardikanto yang mengutip dari Dhahama Bhatnagar (1980) prinsip pemberdayaan antara lain:

- a) Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan selalu efektif jika mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini harus dikaji secara mendalam mengenai kebutuhan apa saja yang diperlukan dan minat apa saja yang disenangi segenap masyarakat yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
- b) Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan selalu efektif jika melibatkan atau menyentuh organisasi masyarakat bawah baik dari keluarga atau kerabat.
- c) Keberagaman budaya, artinya kepercayaan harus memperoleh memperhatikan adanya keberagaman budaya.

Perencanaan pemberdayaan harus disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam.

- d) Kerjasama dan partisipasi, artinya kegiatan pemberdayaan akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerja sama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah direncanakan.
- e) Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menawarkan setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan.
- f) Bekerja sambil belajar, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan masyarakat dapat belajar sambil bekerja atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan. dengan kata lain kegiatan pemberdayaan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep secara teoritis tetapi juga harus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengaplikasikannya.
- g) Penggunaan metode yang sesuai, artinya kegiatan pemberdayaan harus dilakukan dengan metode yang sesuai dengan kondisi (fisik, lingkungan ekonomi, nilai sosial budaya). Dengan kata lain kegiatan pemberdayaan tidak terpaku hanya satu metode melainkan harus mencari dan menyesuaikan metode yang di anggap cocok untuk diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat.

- h) Kepemimpinan, artinya fasilitator tidak melakukan kegiatan pemberdayaan yang hanya bertujuan untuk kepentingan sendiri, melainkan harus mampu mengembangkan kepemimpinan. Dalam hal ini ini fasilitas sebaiknya mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu tercapainya kegiatan pemberdayaan.
- i) Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. adanya kepuasan akan sangat menentukan keikutsertaan masyarakat pada program-program pemberdayaan selanjutnya (Mardikanto, 2013 : 106 - 107).

Menurut beberapa penulis, seperti Solomon (1976), Rappaport (1981, 1984), Pinderhughes (1984), Swift dan Levin (1987), Weick, Rapp, Sullivan dan Kisthardt (1989) sebagaimana dikutip oleh Suharto (2014: 68) terdapat beberapa prinsip pemberdayaan:

- 1) Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karena pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagaipartner.
- 2) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber- sumber dan kesempatan-kesempatan.
- 3) Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.

- 4) Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
- 5) Solusi-solusi, yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- 6) Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- 7) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri seperti tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan mereka sendiri.
- 8) Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- 9) Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- 10) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif yaitu permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- 11) Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara parallel.

4. Metode Pemberdayaan Masyarakat

a) RRA (*Rapid Rural Appraisal*)

RRA merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat, yang dalam praktik, kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh “*orang luar*” dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Meskipun sering dikatakan sebagai teknik penilaian yang “*cepat dan kasar/kotor*”, tetapi RRA dinilai masih lebih baik dibanding teknik- teknik kuantitatif klasik. Tentang hal ini, Chambers (1980) menyatakan bahwa dibanding teknik-teknik yang lain, RRA merupakan teknik penilaian yang relative “terbuka, cepat, dan bersih” (*fairly- quickly- clean*) dibanding teknik yang “cepat dan kotor” (*quick-and-dirty*) berupa sekedar kunjungan yang dilakukan secara singkat oleh “*ahli*” dari kota. Di lain pihak, RRA dinilai lebih efektif dan efisien dibanding teknik yang “lama dan kotor” (*long and dirty*) yang dilakukan melalui kegiatan survey yang dilakukan oleh *tenaga profesional* yang dipersiapkan melalui *pelatihan khusus* (Mardikanto, 2013: 199).

b) PRA (*Participatory Rapid Appraisal*) atau Penilaian Desa Secara Partisipasi

PRA terfokus pada proses pertukaran informasi dan pembelajaran antara pengumpul data dan responden. PRA, merupakan penyempurnaan dari RRA atau penilaian keadaan

secara partisipatif. Berbeda dengan RRA yang dilakukan oleh sekelompok Tim yang terdiri dari “orang luar”, PRA dilakukan dengan lebih banyak melibatkan “orang dalam” yang terdiri dari semua *stakeholder* (pemangku kepentingan kegiatan) dengan difasilitasi oleh orang luar yang lebih berfungsi sebagai “*narasumber*” atau fasilitator dibanding sebagai instruktur atau guru yang “*mengguru*” (Suharto, 2014: 92). PRA merupakan metode penilaian keadaan secara partisipatif, yang dilakukan pada tahapan awal perencanaan kegiatan (Mardikanto, 2013: 201).

PRA dilakukan pada tahap awal perencanaan kegiatan, melalui PRA dilakukan beberapa kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Pemetaan wilayah (*mapping*) dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian keadaan.
 - 2) Analisis keadaan berupa: (1) keadaan masalah, sekarang, dan kecenderungan di masa depan. (2) Identifikasi mengenai perubahan- perubahan yang terjadi dan alasan atau penyebabnya. (3) Identifikasi akar masalah dan alternatif pemecahan masalah.
- c) FGD (*fokus Grup Discussion*)

Focus Group Discussion (FGD) adalah wawancara kelompok dari sejumlah individu dengan status sosial yang relatif sama, yang memfokuskan interaksi dalam kelompok

berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh pendamping yang berperan sebagai moderator dalam kelompok diskusi tersebut. Hasil wawancara dari metode FGD adalah berupa suatu manuskrip dari diskusi kelompok tersebut.

Partisipan atau peserta FGD dalam suatu diskusi tidak lebih dari 10 *orang* dengan status social atau tingkat jabatan (formal) yang relatif sama. Oleh karena itu pemilihan partisipan atau peserta menjadi sangat selektif dan tergantung dengan topik yang akan didiskusikan (dalam hal ini, topik diskusi adalah yang relevan dengan Program Pengembangan Komunitas) dan “keberhasilan” pelaksanaan sangat tergantung dari pada peranan pendamping sebagai moderator FGD (Nasdian, 2015: 119).

d) Metode PLA dan PAR

PLA menurut konsepnya merupakan payung dari metode-metode partisipan yang berupa RRA, PRA, PAR. PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar (melalui ceramah, curah- pendapat, diskusi dll) sedangkan PAR metode pemberdayaan masyarakat secara aksi atau kegiatan real yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut (Mardikanto, 2013: 203).

Melalui metode PLA dan PAR diharapkan masyarakat akan memperoleh banyak pengetahuan yang berbasis pada pengalaman yang dibentuk dari lingkungan kehidupan mereka yang sangat kompleks, masyarakat akan melihat bahwa masyarakat setempat lebih mampu untuk mengemukakan masalah dan solusi yang tepat di banding orang luar, dan melalui PLA orang luar dapat memainkan peran penghubung antara masyarakat setempat dengan lembaga lain yang diperlukan. Disamping itu mereka dapat menawarkan keahlian tanpa harus memaksakan kehendaknya (*Ibid: 200*).

e) SL atau Sekolah Lapang (*Farmers Field School/FFS*)

SL atau FFS pertama kali dikenalkan oleh SEAMEO (1997) pada usaha tani padi di Filipina dan Indonesia. Khusus di Indonesia, SL/FFS diterapkan pada perlindungan hama terpadu, karena itu kemudian dikenal istilah Sekolah Lapang Perlindungan Hama Terpadu (SLPHT). Sebagai metode pemberdayaan masyarakat, SL/FFS merupakan kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan sekelompok masyarakat pada hamparan tertentu, yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi, kemudian diikuti dengan curah pendapat, berbagi pengalaman (*sharing*), tentang *alternative* dan pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai dengan

sumberdaya yang di miliki. Sebagai suatu kegiatan belajar bersama, SL atau FFS biasanya difasilitasi oleh fasilitator atau sumber-sumber yang berkompeten (Mardikanto, 2013: 204).

f) Pelatihan Partisipasif

Elemen dasar proses pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi dan mobilisasi sosial (*social mobilisation*). Disebabkan lemahnya pendidikan, ekonomi, dan segala kekurangan yang dimiliki, penduduk miskin secara umum tidak dapat diharapkan dapat mengorganisir diri mereka tanpa bantuan dari luar. Hal yang sangat esensial dari partisipasi dan mobilisasi sosial ini adalah membangun kesadaran akan pentingnya mereka menjadi agen perubahan sosial (Hasbiah, 2016: 44).

5. **Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Sebagaimana disampaikan di muka dalam rangka pemberdayaan berlangsung sebuah proses yang berkesinambungan satu dengan yang lain secara bertahap. Adapun tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

a) Penyadaran

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri (*self help*). Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan

pula pada bagian-bagian yang lain (Adi, 2007: 258). Berdasarkan teori Fungsionalisme Struktural yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat merupakan kumpulan sistem- sistem sosial yang berhubungan dan saling ketergantungan antara satu sama lain (Richard, 2000: 68).

b) Pengkapasitasan

Sebelum diberdayakan, masyarakat perlu diberdayakan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut *capacity building*, yang terdiri atas pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem nilai.

c) Pendayaan

Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya. Tahapan program pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.

d) Tahap *networking*; tahapan ini mencakup:

1) Melakukan pelatihan, workshop, dan sejenisnya untuk

membangun setiap kapasitas setiap individu masyarakat agar siap menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada mereka.

- 2) Masyarakat sasaran bersama-sama membuat aturan main dalam menjalankan program, berupa anggaran dasar organisasi, sistem, dan prosedurnya.
 - 3) Membangun jaringan dengan pihak luar seperti pemerintah daerah setempat yang mendukung kelembagaan lokal.
 - 4) Tahap pelaksanaan dan pendampingan
 - 5) Melaksanakan kegiatan yang telah di susun dan direncanakan bersama masyarakat.
- e) Tahap Evaluasi
- Tahap evaluasi mencakup:
- a) Memantau setiap pemberdayaan yang dilakukan
 - b) Mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari tahapan pemberdayaan yang dilakukan
 - c) Mencari solusi atas konflik yang mungkin muncul dalam setiap tahapan pemberdayaan. Tahap evaluasi akhir menjadi jembatan menuju tahap terminasi (Adi, 2007: 252).

6. **Indikator Pemberdayaan Masyarakat**

Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang mampu menolong dirinya sendiri dengan memanfaatkan potensi

yang dimiliki. Oleh karena itu supaya masyarakat dapat berdaya, masyarakat harus memiliki kemampuan berpikir, bertindak, bergerak, berinovasi, bersikap dalam dimensi politik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Masyarakat berdaya harus mampu mengintegrasikan diri dalam suatu organisasi atau kelompok sebagai wadah yang dapat menampung aspirasi dan kepentingannya. Karena di dalam organisasi atau kelompok masyarakat secara bebas terlibat penuh dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan pemenuhan kebutuhannya (Aryadi, dkk, 2010: 8).

Agar dapat mengintegrasikan keempat dimensi (politik, sosial, ekonomi dan lingkungan) masyarakat harus memiliki sifat-sifat seperti bebas merdeka sebagai pribadi yang luhur, memahami diri sendiri dan lingkungannya, proaktif untuk mau bersama, menganggap pihak lain sebagai mitra, jujur, adil dan bertanggung jawab, serta memposisikan dirinya sebagai subyek (Aryadi, dkk, 2010: 9)

Sedangkan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (1999: 139) dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal berikut ini:

- a) Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- b) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk dengan memanfaatkan sumberdaya

yang ada.

- c) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- d) Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok semakin rapi sistem administrasi kelompok, dan semakin luas interaksi kelompok satu dengan kelompok lainnya yang ada di dalam masyarakat.
- e) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial (Sumodiningrat, 1999: 139).

7. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus tercapai, oleh sebab itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Strategi merupakan suatu proses produksi yang penting dan berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian suatu tujuan (Mardikanto, 2013: 169).

Menurut Elliot dalam Sumaryadi (2005, 150) ada tiga strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- a) *The welfare approach* yaitu membantu memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya mereka terkena musibah bencana alam dan pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk memberdayakan rakyat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat.
- b) *The development approach* yaitu pemberdayaan melalui pendekatan yang dilakukan pada pemusatan perhatian dan pembangunan untuk meningkatkan kemandirian, kemampuan dan keswadayaan masyarakat.
- c) *The empowerment approach* yaitu pemberdayaan yang menitik beratkan pada masalah kemiskinan, sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidak berdayaannya.

B. PROGRAM INOVASI DESA (PID)

1. Pengertian Program Inovasi Desa (PID)

Secara etimologi inovasi berasal dari bahasa latin “*innovare*” yang kemudian diserap kedalam bahasa inggris “*innovation*” yang artinya pembaharuan atau perubahan. Inovasi adalah suatu perubahan yang baru menuju kearah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang sebelumnya yang dilakukan dengan sengaja dan berencana. Menurut kamus Merriam-Webstar

Innovation atau inovasi adalah melakukan sesuatu dengan cara yang baru, memiliki ide atau gagasan untuk dilakukan (Maulida, 2108: 27-28). Sedangkan menurut Everett M. Rogers dalam Udin Saefudin (2008:1) inovasi adalah suatu ide atau gagasan, praktek atau objek benda yang disadari atau diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi.

Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan agenda Nawacita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. PID dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Desa sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa secara berkualitas agar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan sumber daya yang memiliki daya saing (Petunjuk teknis pelaksanaan PID, 2019: 1).

PID dilaksanakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi) melalui kerjasama dengan Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi (Satker P3MD Provinsi), dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Petunjuk teknis pelaksanaan PID, 2019: 2).

Pelaksanaan PID didukung dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas desa melalui kegiatan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) dengan fokus pada bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastrukur Desa. Pelaksanaan PID terdiri atas 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

- a) Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID), yaitu kegiatan pendokumentasian, penyebarluasan dan pertukaran praktek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dengan tujuan memberikan inspirasi kepada Desa untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pembangunan Desa.
- b) Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) agar Desa mendapatkan jasa layanan teknis yang berkualitas dari lembaga profesional dalam mewujudkan komitmen replikasi atau adopsi inovasi, serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara regular.
- c) Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), dimaksudkan agar masyarakat desa-desa memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan (Petunjuk teknis pelaksanaa PID, 2019: 2).

2. Tujuan Program Inovasi Desa (PID)

a) Tujuan Umum

PID bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) secara lebih berkualitas melalui pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa, replikasi dan/atau adopsi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif, dukungan layanan lembaga-lembaga P2KTD serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan desa-desa agar memperoleh akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan dasar (Petunjuk teknis pelaksanaan PID, 2019: 3).

b) Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan efektivitas penggunaan dana di desa melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis, terencana dan partisipatif.
- 2) Meningkatkan kapasitas Pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara lebih inovatif dan berkualitas.
- 3) Memfasilitasi peningkatan kapasitas desa melalui layanan jasa P2KTD untuk mewujudkan replikasi atau adopsi kegiatan inovasi desa.

- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan sosial dasar masyarakat desa (Petunjuk teknis pelaksanaa PID, 2019: 2).

3. Lokasi dan Alokasi Program Inovasi Desa (PID)

Lokasi dan alokasi Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 untuk komponen program Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID), Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dan komponen program prioritas Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (PSDM) bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat, tercantum dalam Lampiran II Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019, yang diterbitkan oleh Ditjen PPMD, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Petunjuk teknis pelaksanaa PID, 2019: 3). Lokasi dan alokasi dana bantuan tersebut, sebagai berikut:

a) Lokasi

Lokasi PID khususnya untuk komponen PPID dan P2KTD dilaksanakan di 33 provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta), 434 kabupaten/kota dan di 6.484 kecamatan sedangkan Lokasi PID khususnya untuk prioritas PSDM bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat, dilaksanakan di 33

provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta), 159 kabupaten/kota dan 2.916 kecamatan.

b) Alokasi

Pengalokasian Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 dilakukan di tiap kecamatan secara proporsional, berdasarkan nilai kecukupan alokasi secara keseluruhan. Alokasi Dana Bantuan Pemerintah PID khusus untuk komponen program PSDM berbeda antara lokasi prioritas dan non prioritas. Penetapan alokasi dana tersebut didasarkan pada:

- 1) Jumlah Desa di tiap kecamatan
- 2) Tingkat kesulitan dengan dilandasi dari rata-rata jarak jauhnya desa dengan pusat kecamatan.

4. Sasaran Program Inovasi Desa (PID)

Sasaran kegiatan PID adalah seluruh desa di Indonesia yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Petunjuk teknis pelaksanaa PID, 2019: 3.)

5. Prinsip-Prinsip Program Inovasi Desa

Beberapa prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan PID dalam Petunjuk teknis operasional pelaksanaan PID (2019: 4) adalah sebagai berikut:

- a) Partisipatif; Dalam proses pelaksanaannya harus melibatkan peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, terutama dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, termasuk kelompok masyarakat miskin, terpinggirkan dan disabilitas.
- b) Transparansi dan Akuntabilitas; Masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi kegiatan dan pendanaan, pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- c) Kolaboratif; Semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan di Desa didorong untuk bekerjasama dan bersinergi dalam menjalankan kegiatan yang telah disepakati.
- d) Keberlanjutan; kegiatan yang dilakukan memiliki potensi untuk dilanjutkan secara mandiri, serta mendorong kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- e) Keadilan dan Kesetaraan Gender; Masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan dan dalam pengelolaan program, serta dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan.
- f) Profesional; masyarakat dan desa memperoleh peningkatan kapasitas teknis secara profesional ksesuai standar *safeguard* dan peraturan yang berlaku.

6. Pelaku Program Inovasi Desa (PID)

Pelaku utama PID adalah Tim Inovasi Kabupaten atau Kota (TIK) di tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) di tingkat kecamatan. Pelaku-pelaku PID ditempatkan disetiap tingkatan struktural pemerintahan mulai dari desa hingga pusat. Pelaku-pelaku tersebut ditugaskan untuk memberikan pendampingan teknis dalam mengawal pelaksanaan program sesuai PTO dalam rangka pencapaian target KPI yang telah ditetapkan (PTO PID, 2018: 6). Perincian pelaku-pelaku PID adalah sebagai berikut:

a) Pelaku di Desa

Pelaku di desa adalah pelaku-pelaku program yang berkedudukan di desa dengan perannya masing-masing dalam pelaksanaan PID. Pelaku di desa meliputi:

1) Kepala Desa

Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali pelaksanaan PID di desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memastikan realisasi replikasi atau adopsi komitmen kegiatan inovatif, menyusun regulasi desa yang mendukung pelaksanaan PID (PTO PID, 2018: 6)..

2) Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lainnya mengawasi proses tahapan PID di desa, terutama

realisasi komitmen desa dalam replikasi inovasi, berpartisipasi dalam bursa pertukaran Inovasi serta memberikan saran kepada Kepala Desa dalam menentukan komitmen replikasi (Kartu Komitmen) sesuai prioritas kebutuhan desa dan masyarakat (*ibid* :6).

3) Pendamping Lokal Desa

Pendamping Lokal Desa (PLD) merupakan kepanjangan tangan dari Pendamping Desa (PD) dan TPID di tingkat Desa. Tugas utama PLD adalah berkoordinasi dengan PD, TPID, KPMD dan KPM untuk segala kegiatan terkait PID di desa-desa lokasi tugasnya. Selain itu, PLD bertugas membantu PD dan TPID untuk:

- (a) Melakukan sosialisasi PID kepada Desa dan masyarakat.
- (b) Mendorong partisipasi Desa dan masyarakat dalam keseluruhan tahapan PID.
- (c) Berpartisipasi aktif dan memastikan desa-desa di wilayahnya mengikuti MAD dan bursa pertukaran Inovasi;
- (d) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan inovatif di desa-desa lokasi tugasnya.
- (e) Melengkapi data-data kegiatan inovatif yang dibutuhkan dalam rangka *capturing* awal.

- (f) Mendorong dan memastikan desa-desa di lokasi tugasnya merealisasikan komitmen replikasi dalam RKPDesa dan APBDesa serta mengajukan kebutuhan dukungan P2KTD jika perlu.
 - (g) Mengawal pelaksanaan replikasi atau adopsi inovasi oleh desa-desa di lokasi tugasnya;
 - (h) Membuat laporan pelaksanaan PID (*ibid*)
- 4) Kader Pembangunan Manusia
- Kader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan kader yang ditempatkan khusus di desa-desa yang menjadi lokasi prioritas Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM). KPM memiliki peran memastikan tersedianya kegiatan pelayanan sosial dasar bidang kesehatan dan pendidikan di desa, serta memastikan masyarakat terutama Ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun (Baduta) memperoleh layanan tersebut secara konvergen. Secara rinci KPM bertugas:
- (a) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *stunting* melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini *stunting* dengan tingkat pertumbuhan;
 - (b) Mengidentifikasi sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui peta sosial desa dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD);

- (c) Memfasilitasi desa untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa dalam RKPDesa dan APBDesa untuk intervensi *stunting*;
- (d) Mendukung desa dan masyarakat untuk memantau dan memastikan konvergensi lima paket layanan pada rumahtangga 1000 HPK menerima dan melaporkan hasilnya;
- (e) Bekerjasama dengan PLD, PD dan TPID dalam mengidentifikasi kegiatan-kegiatan inovatif di bidang PSD dan upaya penanggulangan *stunting*;
- (f) Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam rangka *capturing* awal (*ibid*: 7) .

b) Pelaku di Kecamatan

1) Camat

Camat atas nama Bupati berperan sebagai Pembina PID di wilayah Kecamatan serta bertugas membuat Surat Penetapan Camat (SPC) untuk penetapan TPID. Sebagai Pembina, Camat memberikan saran-saran atas pelaksanaan PID dan kinerja TPID, hasil *capturing*, pelaksanaan replikasi atau adopsi inovasi oleh desa-desa di wilayah tugasnya, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan PID secara menyeluruh.

2) Tim Pelaksana Inovasi Desa

Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) merupakan kelompok masyarakat pelaksana kegiatan PID yang berkedudukan di kecamatan, dan dipilih melalui forum MAD yang selanjutnya dikukuhkan oleh Camat atas nama Bupati atau Walikota melalui SPC. TPID bertugas dan bertanggung jawab mengelola Dana Bantuan Pemerintah PID di kecamatan bersangkutan (*ibid*).

(a) Kriteria TPID

- 1) Tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik tertentu.
- 2) Tidak sedang menjabat sebagai staf inti desa dan kecamatan.
- 3) Memiliki dedikasi tinggi terhadap pembangunan desa dan kawasan.
- 4) Memiliki referensi luas dan minat tinggi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif.
- 5) Kreatif dalam mengelola pengetahuan dan inovasi desa.
- 6) Berasal dari perwakilan desa dengan mengutamakan keterwakilan perempuan.

(b) Tugas dan tanggung jawab TPID

- 1) Menerima, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan hasil penggunaan Dana Bantuan Pemerintah PID sesuai peruntukkan.
- 2) Menyosialisasikan PID kepada masyarakat.
- 3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PID.
- 4) Memfasilitasi MAD dan forum-forum pertemuan masyarakat lainnya.
- 5) Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan replikasi atas komitmen dari BID Tahun 2018 oleh desa-desa di wilayahnya, melalui Identifikasi komitmen replikasi yang masuk dalam RKPDesa dan APBDDesa 2019 di setiap desa.
- 6) Identifikasi desa-desa dan kegiatan yang membutuhkan layanan P2KTD melalui Kartu Layanan P2KTD.
- 7) Membuat prioritas kegiatan yang akan dilayani oleh P2KTD melalui MAD.
- 8) Membuat RAB kegiatan-kegiatan yang akan dilayani P2KTD dan mengajukannya kepada Pokja P2KTD-TIK.

- 9) Memantau pelaksanaan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas teknis oleh P2KTD.
- 10) Mengelola dan menyelenggarakan bursa pertukaran Inovasi tahun 2019 serta mengadvokasi komitmen replikasi oleh desa-desa peserta Bursa tahun 2019.
- 11) Mengawal replikasi atas komitmen dari Bursa tahun 2019 oleh desa-desa di wilayah kerjanya, agar masuk dalam RKPDesa dan APBDDesa tahun 2020.
- 12) Memfasilitasi dan memastikan terlaksananya proses pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa dengan baik, terutama pendokumentasian kegiatan-kegiatan inovatif di wilayah kerjanya, melalui.
- 13) Identifikasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif dari Kartu IDE yang terjaring dalam Bursa tahun 2019.
- 14) Verifikasi dan melengkapi data-data pendukung kegiatan inovatif yang dibutuhkan untuk dokumen pembelajaran.
- 15) Melakukan *capturing* dengan mengisi template dokumen pembelajaran yang telah disediakan.

- 16) Mengajukan hasil-hasil *capturing* kepada TIK untuk divalidasi dan dipilih sebagai menu inovasi lokal atau menu inovasi nasional.
- 17) Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan program.
- 18) Mengelola kegiatan PSDM
- 19) Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan TPID (*ibid*).

(c) Susunan Pengurus TPID

Kepengurusan TPID terdiri atas:

- (1) Ketua, bertugas untuk memimpin tim dalam mengelola pelaksanaan kegiatan PID termasuk legalisasi pencairan Dana Bantuan Pemerintah PID dan laporan kegiatan.
- (2) Bendahara, bertugas membuat administrasi pengelolaan dan transaksi keuangan Dana Bantuan Pemerintah PID, serta membantu Ketua dalam menyiapkan laporan pertanggung jawaban.
- (3) Bidang Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID), bertugas untuk memfasilitasi identifikasi, verifikasi, pendokumentasian (*capturing*), pertukaran hasil *capturing* dari desa-desa di wilayahnya atau dari tempat lain yang direkomendasikan oleh TIK.

- (4) Bidang Verifikasi Inovasi, bertugas memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada MAD bagi desa-desa yang berminat melakukan replikasi kegiatan inovasi melalui APBDesa.
- (5) Bidang P2KTD, bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan desa akan peningkatan kapasitas teknis dalam melaksanakan replikasi atau adopsi kegiatan inovatif, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara reguler. Secara Bidang P2KTD bertugas untuk.
 - (1) Melaksanakan identifikasi kebutuhan layanan lembaga P2KTD oleh desa-desa.
 - (2) Menyusun prioritas dan menetapkan kebutuhan layanan P2KTD.
 - (3) Menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan layanan P2KTD ke TIK-Pokja P2KTD.
 - (4) Melaksanakan kontrak kerja dengan P2KTD.
 - (5) Memantau pelaksanaan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas teknis oleh P2KTD.
 - (6) Menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan P2KTD.
 - (7) Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah pelaksanaan P2KTD.

(8) Bidang PSDM bertugas untuk membantu mengelola kegiatan inovasi pengembangan sumber daya manusia. Bidang ini khusus untuk lokasi-lokasi pelaksanaan PSDM, dengan tugas sebagai berikut:

- (a) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas inovasi pengembangan sumber daya manusia.
- (b) Memfasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan PSDM.
- (c) Memfasilitasi kegiatan Pra Musrenbang.
- (d) Menyusun laporan kegiatan (ibid: 14).

c) Pelaku di Kabupaten/Kota

1) Bupati

Bupati/Walikota merupakan pembina PID di tingkat Kabupaten/Kota dan menetapkan TIK melalui Surat Keputusan.

2) Dinas PMD dan OPD Terkait

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas PMD atau nama lain, bersama OPD terkait yang merupakan bagian dari TIK, bertanggungjawab melakukan pembinaan, baik pelaksanaan program, Tenaga Ahli atau tenaga pendamping, anggaran, dana operasional dan administrasi

program (*ibid*: 9). Secara rinci tugas dan tanggung jawab Dinas PMD serta OPD terkait, sebagai berikut:

- (a) Melakukan sosialisasi PID kepada OPD lain.
- (b) Menyiapkan rencana kerja dan dukungan teknis pelaksanaan PID.
- (c) Bersama TIK melakukan pengawasan pelaksanaan PID, verifikasi dokumen pembentukan TPID sebelum diajukan ke Provinsi dan verifikasi dokumen permintaan pencairan dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah PID dari TPID sebelum diajukan ke Provinsi.
- (d) Memfasilitasi kegiatan dan anggaran yang diperlukan oleh TIK terkait pelaksanaan Bantuan Pemerintah PID.
- (e) Menjamin kelengkapan dan keabsahan dokumen pelaksanaan Bantuan Pemerintah PID dari TPID sebagai bahan audit.
- (f) Memfasilitasi pembentukan Pokja di PID.
- (g) Memberikan dukungan regulasi untuk keberlanjutan program.
- (h) Menyelenggarakan rapat koordinasi PID.
- (i) Melakukan pembinaan dan pengendalian kepada lembaga P2KTD dalam memberikan layanan teknis kepada desa.

- (j) Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan TPID.
 - (k) Melaporkan kegiatan PID ke Satker P3MD Provinsi (PTO PID: 20).
- 3) Tim Inovasi Kabupaten/Kota

Tim Inovasi Kabupaten/Kota (TIK) merupakan pelaksana PID di tingkat kabupaten/kota. TIK dibentuk dan ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota dan berlaku selama satu tahun anggaran. TIK terdiri dari perwakilan OPD, akademisi, serta perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dinilai inovatif, terutama dalam penggunaan dana desa. Anggota TIK dipilih/diusulkan oleh instansi terkait dengan mempertimbangkan kualitas dan kemampuan individu, ketertarikan dalam mengelola pengetahuan atau inovasi, terutama merekam (mendokumentasikan), menyimpan, serta menyebarkannya kepada berbagai pihak, baik di lingkungan kabupaten, antar-kabupaten bahkan lintas provinsi (*ibid*: 11). Tugas Umum TIK adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisasi PID di lingkungan kerjanya dan tingkat kabupaten/kota.

- b) Mendorong partisipasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program.
- c) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PID di wilayah kerjanya sesuai bidang kerja masing-masing.
- d) Memastikan pelaksanaan PID di wilayahnya berjalan baik, mendorong TPID dan P2KTD bekerja dengan baik dalam mencapai indikator keberhasilan.
- e) Memfasilitasi penyelesaian penanganan pengaduan dan masalah program.

TIK terdiri atas dua Kelompok Kerja (Pokja), yaitu Pokja PPID dan Pokja P2KTD dengan tugas sebagai berikut:

(1) Pokja PPID:

- (a) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan PPID.
- (b) Mendorong TPID bekerja dengan baik, terutama dalam pengidentifikasian, pendokumentasian (*capturing*), hingga pertukaran kegiatan-kegiatan inovatif melalui bursa pertukaran Inovasi;
- (c) Memvalidasi hasil *capturing* dari Kartu Inovasi Desaku (IDE) yang difasilitasi TPID untuk dipilih:
1) sebagai Menu Lokal, dan 2) diusulkan ke Nasional melalui Provinsi sebagai Menu Nasional.

(d) Menjalankan percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didanaikan.

(e) Membuat laporan kegiatan.

(2) Pokja P2KTD

(a) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan peningkatan kapasitas teknis desa-desa di wilayah kerjanya.

(b) Menyelesaikan dan meng-update Direktori P2KTD sesuai ketentuan.

(c) Merekomendasikan P2KTD yang cocok dalam memberikan peningkatan kapasitas teknis sesuai kebutuhan desa yang diajukan TPID, baik dalam rangka replikasi/adopsi kegiatan inovatif maupun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa reguler.

(d) Melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan pelaksanaan kegiatan P2KTD, termasuk pelatihan P2KTD.

(e) Menyusun laporan kegiatan.

(3) Sekretariat TIK

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TIK, dibentuk Sekretariat TIK yang dipimpin oleh Sekretaris TIK dan berkedudukan di Dinas PMD Kabupaten/Kota. Sekretariat TIK memberikan

dukungan administrasi teknis kepada TIK serta bertanggung jawab kepada Ketua TIK. Pembentukan Sekretariat TIK ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota.

(4) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten/Kota adalah team tenaga ahli yang ditempatkan di setiap kabupaten/kota untuk memfasilitasi pelaksanaan PID dan memastikan tahapan kegiatan PID berjalan sesuai prosedur dan ketentuan. TAPM maksimal berjumlah enam orang di setiap kabupaten/kota, yaitu:

- (a) TAPM Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PMD), Bidang Perencanaan Partisipatif (PP) dan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) bertugas memfasilitasi kegiatan pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa. Salah satu TAPM tersebut dipilih sebagai mentor proses “*capturing*” kegiatan inovatif. Secara rinci tugas TAPM bidang Pemberdayaan Masyarakat (PMD), bidang Perencanaan Partisipatif (PP) dan Bidang teknologi tepat guna (TTG) adalah sebagai berikut :

- (1) Menyosialisasikan PID, kemajuan kegiatan dan hasilnya di bidang pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa kepada masyarakat melalui berbagai forum musyawarah, media, atau rapat koordinasi.
 - (2) Memfasilitasi pembentukan TIK.
 - (3) Membantu Pokja PPID pada TIK, melakukan koordinasi dengan pelaku lain, pelaporan kemajuan pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa, rapat koordinasi, serta mengelola Peluncuran Bursa Inovasi di Kabupaten secara mandiri.
 - (4) Mengembangkan jaringan pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa dengan *stakeholder (government dan corporate)*.
 - (5) Memberikan peningkatan kapasitas TPID dan pelaku lain terkait pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa.
 - (6) Memfasilitasi penanganan dan pengaduan masalah yang terkait dengan program. Membuat laporan kegiatan.
- (b)TAPM Bidang Infrastruktur Desa (ID), Bidang Pengembangan Ekonomi Desa (PED) dan Bidang Pelayanan Sosial Dasar (PSD) membantu

mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan P2KTD. Secara rinci tugasnya adalah sebagai berikut:

- (1) Menyosialisasikan PID, kemajuan kegiatan dan hasilnya terkait P2KTD kepada masyarakat melalui berbagai forum musyawarah, media, atau rapat koordinasi.
- (2) Memfasilitasi pembentukan TIK.
- (3) Membantu Pokja P2KTD pada TIK dalam mengelola P2KTD termasuk verifikasi dan update P2KTD, berkoordinasi dengan pelaku lain, pelaporan kemajuan P2KTD, rakor, orientasi Pokja TIK dan P2KTD, serta mengelola Peluncuran bursa pertukaran Inovasi di Kabupaten secara mandiri.
- (4) Mengembangkan jaringan P2KTD dengan *stakeholder (government dan corporate)*.
- (5) Memberikan peningkatan kapasitas TPID dan pelaku lain terkait P2KTD, serta memastikan layanan jasa P2KTD sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.
- (6) Memfasilitasi penanganan dan pengaduan masalah yang terkait program.

- (7) TA PSD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan PSDM.
 - (8) Membuat laporan kegiatan.
- (c) Bidang Analisis Data dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Tenaga Analisis Data. Secara rinci, tugas TAPM bidang analisis data (TAD) adalah sebagai berikut:
- (1) Mengumpulkan data dan informasi pelaksanaan PID secara berkala di wilayah dampingan, termasuk kegiatan bursa pertukaran Inovasi Desa (BID), replikasi serta penyerapan dana dekonsentrasi.
 - (2) Melakukan entry data dan analisis data PID.
 - (3) Memfasilitasi penyediaan data dan informasi terkait penilaian kinerja program (*key performance indicators*).
 - (4) Mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan PID, termasuk pencatatan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen fisik.
 - (5) Menyebarluaskan data dan informasi Program Inovasi Desa di wilayah dampingannya.
 - (6) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi PID kepada koordinator program kabupaten.

d) Pelaku di Provinsi

1) Gubernur

Gubernur merupakan pembina PID di provinsi, pengembangan peran serta para pihak terutama Dinas PMD dan OPD terkait, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program.

2) Dinas PMD Provinsi, tugas dinas PMD Provinsi sebagai berikut:

- (a) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengawasan operasional kegiatan dan keberhasilan PID, teknis administrasi keuangan program, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian dan pelestarian kegiatan program.
- (b) Mensosialisasikan PID, berkoordinasi dengan para pihak, terutama OPD terkait, termasuk rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan program, masalah-masalah dan penyelesaiannya.
- (c) Mengelola Tenaga Pendamping Profesional dalam hal rekrutmen, penempatan/ relokasi atau demobilisasi, pengendalian dan evaluasi kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, orientasi, penyediaan ruang kerja dan fasilitasnya, termasuk

akses data dan kebijakan, serta pembinaan dan pengendalian P2KTD.

(d) Membuat laporan periodik dan insidental kepada Gubernur terkait pelaksanaan PID dan laporan kegiatan program.

3) Tenaga Ahli Program Provinsi

Tenaga Ahli Program Provinsi (TAPP) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan PID di level provinsi sebanyak 3 orang. Namun, dalam struktur pengelolaan program yang dikelola oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Tenaga Ahli PID Provinsi menjadi satu kesatuan manajemen dengan Tenaga Ahli P3MD Provinsi, yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli Program Provinsi (TAPP). Tugas dan tanggung TAPP adalah sebagai berikut:

- (a) Memimpin suatu gugus manajemen lapangan yang akan mengoordinasikan dan mengendalikan PID di lapangan.
- (b) Melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan PID.
- (c) Melakukan pemantauan dan supervisi, serta mengoordinasikan upaya dan tindak lanjut pelestarian kegiatan.

- (d) Mengoordinasikan pengendalian mutu teknis dari seluruh kegiatan PID di wilayah koordinasinya.
- (e) Memberikan dukungan manajemen dalam penanganan masalah di lapangan.
- (f) Melakukan pengendalian fungsional TA dan Tenaga Pendamping Profesional pada lingkup wilayah kerjanya.
- (g) Membangun tim kerja antar tenaga ahli di wilayah kerjanya.
- (h) Memantau dan melakukan koordinasi penilaian kinerja Tenaga Pendamping Profesional.
- (i) Mengembangkan jaringan kerja sama, fasilitasi dan komunikasi antar lembaga, termasuk instansi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.
- (j) TA PSD Provinsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan PSDM.
- (k) Menyampaikan laporan reguler dan insidentil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Konsultan Nasional (KN) PID, serta melaporkan kemajuan kegiatan beserta kendala di lapangan kepada KN PID dengan tembusan kepada Sekretariat Program PMD.

4) Sekretariat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sekretariat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Sekpro PMD) dipimpin seorang Kepala Sekretariat dengan didukung oleh beberapa tenaga profesional. Fungsi dan perannya adalah menjaga proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PID secara nasional agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PID. Tugas dan tanggung jawab Sekpro PMD adalah sebagai berikut:

- (a) Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi pelaksanaan program, pengendalian terhadap fungsi dan kinerja pendamping dan konsultan, serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan PID, termasuk supervisi dan monitoring pelaksanaan PID di lapangan, serta evaluasi capaian program, termasuk hasil capturing dan paska-bursa pertukaran Inovasi.
- (b) Menyiapkan manual dan penjelasan teknis terkait pelaksanaan program.
- (c) Menyenggarakan seleksi, penempatan pendamping dan konsultan, serta pelatihan bagi para pelaku PID, termasuk evaluasi kinerja.

- (d) Menyoliasisasikan PID melalui seminar dan/atau workshop.
- (e) Memberikan dukungan dan strategi penanganan pengaduan masalah yang berdampak luas pada masyarakat, serta tindak lanjut penanganannya.
- (f) Memberikan masukan teknis dan manajemen dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan sebagai landasan keputusan Ditjen PPMD.

5) Konsultan Nasional

petunjuk teknis operasional PID (2018: 25) menjelaskan Konsultan Nasional (KN) adalah tim tenaga ahli program di tingkat pusat, dengan lingkup wilayah kerja secara nasional (mencakup semua wilayah/provinsi/ kabupaten/kecamatan dan desa) dan dikoordinir oleh 1 orang Koordinator Program (*Program Leader*). Tugas dan tanggung jawab KN adalah sebagai berikut:

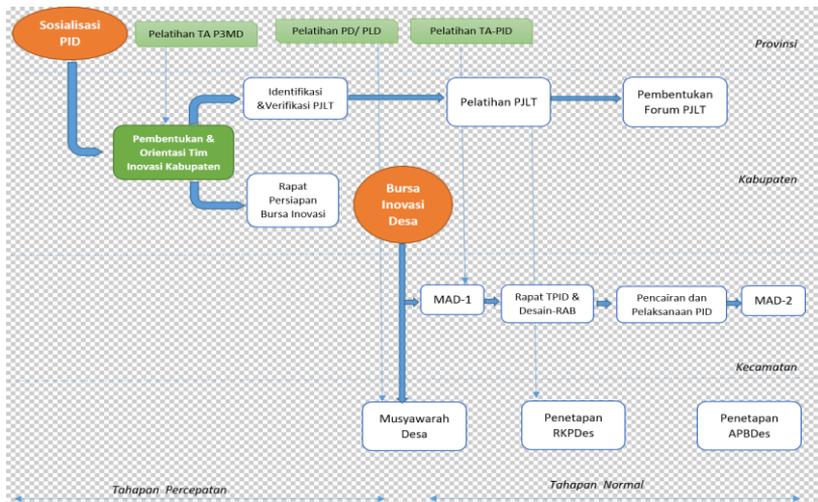
- (a) Menyusun strategi, mengelola dan menyosialisasikan PID kepada parapihak.
- (b) Menyusun strategi peningkatan partisipasi dan dukungan parapihak dalam PID.
- (c) Menyusun strategi dan memastikan kegiatan PPID berjalan di berbagai jenjang, menghasilkan dokumen pembelajaran yang terverifikasi, valid dan memenuhi kaidah safeguard.

- (d) Menyusun strategi dan memastikan kegiatan P2KTD berjalan baik.
- (e) Mengawal dan mengendalikan terciptanya platform pertukaran pengetahuan, komunikasi informasi dan edukasi (KIE), baik secara konvensional maupun digital, sistem dan aplikasi pengelolaan pengetahuan.
- (f) Menyusun strategi dalam mendorong realisasi komitmen replikasi masuk ke dalam perencanaan regular desa dan APBDesa yang mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan bidang infrastruktur, ekonomi lokal dan sumberdaya manusia.
- (g) Membuat laporan kegiatan secara berkala.

7. Tahapan Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)

Secara garis besar program inovasi desa (PID) merupakan inovasi dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas atau hasil kerja Desa-Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas. PID merupakan upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-inovasi pembangunan desa serta memperkuat peran pendamping dengan banyak referensi dalam proses pendampingan P3MD di desa. Di bawah ini adalah gambar alur pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID).

Gambar. 1 Alur Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID).



Sumber: Buku saku PID (diunduh pada Jum'at, 1 Nopember 2019)

Dalam Petunjuk teknis operasioan pelaksanaan PID (2018: 30) menyebutkan Tahapan-tahapan pelaksanaan program inovasi desa (PID) adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PID di Desa Magersari Tahun Anggaran 2019, diutamakan untuk menindaklanjuti sejumlah capaian yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 guna mencapai Tujuan Pengembangan Proyek atau *Project Development Objective* (PDO) dan Indikator Kunci Keberhasilan atau *Key Performance Indicator* (KPI), yakni:
 - a) Mensosialisasikan secara terus-menerus PID kepada para pihak di berbagai jenjang.

- b) Mengevaluasi pelaksanaan PID tahun 2018 serta menyusun perencanaan kegiatan program dan pembangunan melalui forum-forum musyawarah.
- c) Mengawal dan menindak lanjuti hasil-hasil dari bursa inovasi desa 2018, terutama komitmen replikasi atau adopsi oleh setiap desa berdasarkan Kartu Komitmen, pendokumentasian Inovasi Desaku (IDE) dari setiap desa yang terjaring melalui Kartu IDE.
- d) Mengidentifikasi dan memastikan ketersediaan P2KTD.
- e) Peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan pelaku program.
- f) Pelembagaan program, terutama pelembagaan kegiatan-kegiatan pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa di tingkat desa melalui advokasi pengembangan dan peluncuran berbagai kebijakan di berbagai jenjang.

Dengan demikian, kegiatan-kegiatan pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa termasuk pendokumentasian, pertukaran inovasi dan penyelenggaraan bursa pertukaran inovasi.

2. Tindak Lanjut Hasil Kegiatan

Pelaksanaan PID yang merupakan tindak lanjut dari hasil dan pencapaian kegiatan pada PID tahun sebelumnya. Kegiatan setiap tahun pelaksanaan PID harus berdasarkan pada pelaksanaan program tahun sebelumnya (PTO PID, 2018: 20).

3. Musyawarah Antar Desa I

Pendamping Desa (PD) berkoordinasi dan memfasilitasi Camat untuk melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) I. Forum MAD dilaksanakan secara swadaya dengan dihadiri oleh perwakilan seluruh desa (minimal tiga orang perwakilan desa, yaitu Kepala Desa, Unsur BPD, tokoh masyarakat, dengan mempertimbangkan keterlibatan perempuan minimal dua orang). MAD I juga melibatkan Kepala Seksi (Kasi) PMD dan perwakilan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tingkat kecamatan yang relevan seperti Puskesmas, UPTD Pendidikan, PU kecamatan, dan lain-lain.

1) Tujuan Pelaksanaan MAD - I:

- a. Menyosialisasikan kembali PID.
- b. Menyampaikan kemajuan kegiatan dan penggunaan dana PID tahun sebelumnya.
- c. Menetapkan TPID lama sebagai TPID tahun berjalan, kecuali jika terdapat penggantian personil.
- d. Menetapkan kepanitian bursa pertukaran Inovasi tahun berjalan.

2) Hasil dan Keluaran MAD - I:

Hasil dan keluaran MAD - I adalah Berita Acara MAD dan hasil perumusan kegiatan yang terdiri atas:

- a. Kemajuan kegiatan dan hasil evaluasi PID tahun lalu;
- b. TPID tahun berjalan;

c. Panitia Pelaksana Bursa Pertukaran Inovasi.

TPID selanjutnya akan melakukan rapat terpisah untuk menyusun rencana kegiatan PID tahun berjalan, termasuk tindak lanjut dari kegiatan tahun sebelumnya, bursa pertukaran Inovasi tahun berjalan, prioritas usulan kegiatan dan RAB tahun berjalan.

4. Persiapan Bursa Pertukaran Inovasi

Bursa pertukaran inovasi atau sebelumnya dikenal dengan bursa inovasi desa (BID). BID sendiri merupakan bagian penting pelaksanaan PID, yakni sebagai ruang untuk pertukaran pengetahuan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dinilai inovatif, sehingga Desa mendapatkan referensi bagi kegiatan pembangunan yang menggunakan dana desa.

1) Persiapan pelaksanaan Bursa Pertukaran Inovasi meliputi:

a. *Capturing*,

PID menyediakan Dana Bantuan Pemerintah sebagai Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan *capturing*. *Capturing* merupakan kegiatan mendokumentasikan Inovasi Desaku (IDE) yang diinformasikan oleh sejumlah desa dalam BID tahun sebelumnya melalui Kartu IDE. Hasil *capturing* akan menjadi menu inovasi dalam Bursa Pertukaran Inovasi tahun berjalan, baik menu lokal ataupun menu nasional.

- b. TIK-Pokja PPID bersama TPID menyiapkan dan mengelompokkan IDE dari Kartu IDE hasil Bursa tahun sebelumnya untuk diidentifikasi muatan inovasinya;
 - c. Hasil identifikasi diserahkan kepada TPID untuk di-*capture* dengan memastikan bahwa inovasi yang telah disampaikan adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh desa dan terbukti berhasil, bukan usulan atau gagasan baru;
 - d. *Capturing* dilakukan terhadap IDE yang lolos identifikasi dan disetujui untuk di-*capture* oleh masyarakat melalui forum musyawarah;
5. Pelaksanaan Bursa Pertukaran Inovasi

Bursa Pertukaran Inovasi atau dikenal sebagai bursa inovasi desa merupakan media pertukaran pengetahuan terkait kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dinilai inovatif. bursa pertukaran Inovasi bukan pameran barang atau bazaar produk-produk hasil Desa. Bursa pertukaran inovasi dilaksanakan di kecamatan atau pengklasteran dan dikelola oleh TPID dengan dukungan TIK. Bursa pertukaran Inovasi dapat diawali dengan peluncuran bursa pertukaran inovasi di Kabupaten/Kota yang dikelola oleh TIK secara mandiri dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Panduan pelaksanaan bursa pertukaran inovasi, akan diterbitkan tersendiri oleh Unit Kerja Eselon II Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa (Direktorat PMD), pada

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) yang merupakan turunan langsung dari PTO PID Tahun 2018 (PTO PID,2018 : 22).

6. Komitmen Replikasi Hasil Bursa Tahun Sebelumnya

PID melalui BID tahun sebelumnya menjangking komitmen desa-desa untuk mereplikasi dan/atau mengadopsi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dinilai inovatif, sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan desa. Pada tahun anggaran berjalan, realisasi replikasi berasal dari komitmen yang dibuat dalam BID tahun sebelumnya, dimana komitmen tersebut harus masuk dalam RKPDesa tahun berjalan dan dananya dialokasikan dalam APBDesa tahun berjalan.

7. Mengawal Komitmen Replikasi dari Bursa

Bursa pertukaran inovasi diharapkan semakin banyak komitmen desa untuk mereplikasi atau mengadopsi kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang terjaring melalui “Kartu Komitmen”. Tindak lanjut paska-Bursa Pertukaran Inovasi diarahkan agar komitmen tersebut masuk kedalam RKPDesa tahun anggaran berikutnya hingga memastikan pengalokasian pembiayaan pada APBDesa tahun anggaran berikutnya.

8. Musyawarah Antar Desa II

Musyawarah Antar Desa (MAD) II diselenggarakan di kecamatan, untuk penyampaian laporan pertanggung jawaban pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah PID. Laporan pertanggung jawaban TPID tersebut, selanjutnya disampaikan kepada TIK yang ditembuskan kepada Satker P3MD Provinsi.

BAB III
GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
INOVASI DESA (PID)

A. Gambaran Umum Desa Magersari

1. Keadaan Geografis

Secara geografis Desa Magersari berada di wilayah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal di Provinsi Jawa Tengah. Desa Magersari merupakan desa dengan wilayah terkecil di Kecamatan Patebon dengan luas 29 H. Desa Magersari merupakan dataran Rendah yang terletak di tengah Desa Kumpulrejo. Terbagi kedalam 10 (sepuluh) rukun tetangga (RT) dengan 2 (dua) rukun warga (RW) dan hanya terdapat satu dusun atau dukuh di Desa Magersari, yaitu Dusun Magersari. Desa Magersari merupakan desa yang tidak memiliki tanah perkebunan atau ladang, sehingga sebagian besar penduduk di Desa Magersari bermata pencaharian sebagai nelayan (IDM KEMENDESA: 2019).

Gambar. 2 Peta Desa Magersari



Sumber : Google map (diunduh pada 21 November 2019 Pukul 02:09 WIB)

Adapun secara administratif Desa Magersari berbatasan langsung dengan Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Baik dari bagian Utara, Timur, Tenggara dan Selatan, jadi Desa Magersari berada di tengah-tengah Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon dan di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Sungai Bodri yang langsung menuju ke laut.

2. Keadaan Demografis

Desa Magersari secara demografis memiliki kepadatan penduduk dengan penyebaran yang belum signifikan karena sempitnya wilayah yang dimiliki. Dengan Jumlah penduduk

menurut hitungan kepala keluarga (KK) adalah 588 jiwa yang terbagi ke dalam 10 rukun tetangga (RT) dengan 2 rukun warga (RW). dan jumlah penduduk total individu adalah 1.639 jiwa pertahun 2019. Berikut adalah data deografi yang di dapatkan:

Tabel.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

NO	TINGKAT UMUR	JUMLAH
1.	<1 Tahun	50
2.	1-4 Tahun	147
3.	5-14 Tahun	248
4.	15-39 Tahun	690
5.	40-64 Tahun	414
6.	65 Tahun ke atas	90
Jumlah Total		1.639

Sumber dari data indeks desa membangun (IDM) Desa Magersari Tahun 2019

NO	WILAYAH	JUMLAH
1.	Laki-laki	841
2.	Perempuan	798
Jumlah Total		1.639

Tabel. 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber dari data indeks desa membangun (IDM) Desa Magersari Tahun 2019

Data penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa banyaknya usia remaja- dewasa yaitu umur 15-39 tahun sebanyak 690 jiwa, usia anak-anak antara umur 5-14 tahun yaitu sebanyak 248 jiwa dan penduduk dewasa dengan usia antara 40-64 tahun yaitu sebanyak 414 jiwa. Dan dari data penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Magerasi di dominasi oleh laki-laki sebanyak 841 jiwa dan perempuan sebanyak 789 jiwa pertahun 2019.

Kemudian di bawah ini adalah jumlah penduduk menurut pendidikan. Jika dilihat, rata- rata penduduk Desa Magersari menempuh pendidikan sampai sekolah dasar (SD). Akan tetapi banyak juga yang sampai pada SLTA. Angka pada tiap jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) sebanyak 541 jiwa. kemudian pada tingkat SLTP sebanyak 300 jiwa, dan pada tingkat SLTA sebanyak 142 jiwa dan penduduk yang tidak atau belum sekolah sebanyak 478 jiwa.

Tabel. 3
Daftar Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir

NO	KETERANGAN	L	P	JUMLAH
1.	Tidak/ Belum sekolah	247	231	478
2.	Belum tamat SD/Sederajat	76	67	143

3.	Tamat SD/Sederajat	285	256	541
4.	SLTP//Sederajat	153	147	300
5.	SLTA/Sederajat	87	55	142
6.	Diploma I/II	1	0	1
7.	Akademi/ Diploma III/S.Muda	1	5	6
8.	Diploma IV/ Strata I	15	13	28
9.	Strata II	0	0	0
10.	Strata III	0	0	0
Jumlah Total		865	774	1.639

*Sumber dari data indeks desa membangun (IDM) Desa Magersari
Tahun 2019*

Selanjutnya adalah data jumlah penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian. Dari data yang ada, penduduk dengan mata pencaharian sebagai nelayan menduduki peringkat pertama dengan jumlah 514 jiwa. Yang kedua adalah penduduk dengan mata pencaharian sebagai pedagang dengan jumlah 247 jiwa. Dan sisanya adalah pelajar/mahasiswa, ibu rumah tangga, buruh harian lepas, karyawan swasta, buruh nelayan, guru dan tukang kayu.

Tabel. 4
Daftar Penduduk berdasarkan Mata Pencapaian

NO	KETERANGAN	L	P	JUMLAH
1.	Mengurus rumah tangga	0	260	200
2.	Pelajar/ mahasiswa	127	56	183
3.	Pedagang	137	110	247
4.	Nelayan/ perikanan	511	3	514
5.	Karyawan swasta	52	26	78
6.	Petani/Pekebun	3	2	5
7.	Buruh harian lepas	24	123	147
8.	Buruh nelayan/ perikanan	18	9	27
9.	Tukang kayu	4	0	4
10.	Pembantu rumah tangga	0	1	1
11.	Guru	2	7	9
12.	Sopir	1	0	1
13.	Wiraswasta	112	44	156
14.	Pensiunan	1	1	2
15.	Pegawai negeri sipil (PNS)	3	2	5
Jumlah Total		995	644	1.639

Sumber dari data indeks desa membangun (IDM) Desa Magersari Tahun 2019

3. Keadaan Sosial dan Kepercayaan

Dilihat dari kehidupan sosial, Desa Magersari masih melestarikan kebudayaan leluhur. hal ini dibuktikan

dengan warga masih melaksanakan acara selamatan untuk setahun sekali sebagai syukur atas hasil laut. Dalam istilah Desa Magersari di sebut sedekah laut. Desa Magersari dalam 4 tahun terakhir ini juga melaksanakan kegiatan *Bodri culture's Festival* dimana kegiatan tersebut didalamnya memuat pertunjukan beberapa kesenian dari Jawa Tengah, seperti Reog dan Jatilan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Basit Selaku Sekretaris Desa, pada Kamis, 14 Nopember 2019:

“Desa Magersari itu wargane masih pada sengkuyung mbak, isih seneng gotong royong. Apalagi menjelang Bodri culture Festival, bentuk gotong royong warga makin keliatan. Dulu Magersari iku sebuah kademangan, setingkat dengan Kecamatan di bawah naungan kadipaten Kaliwungu sebelum adanya Kabupaten Kendal. Jadi istilah warga sini masih suka nguri-uri budoyo Jowo mbak. ya meskipun sudah banyak perubahan karena tergerus era Modernisasi”

Selanjutnya dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat Desa Magersari Kecamatan Patebon Kanupaten Kendal dari hasil data monografi menjelaskan bahwa semua masyarakat Desa Magersari merupakan pemeluk agama Islam dengan 1 (satu) buah Masjid sebagai sarana ibadah di Desa Magersari (IDM KEMENDESA :2019).

4. Potensi Unggulan Desa

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang dikutip oleh Mardikanto (2013) dalam bukunya yang berjudul

“Pemberdayaan Masyarakat: perspektif kebijakan publik”, menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah (provinsi, kabupaten atau kota) berhak dan sekaligus bertanggung jawab mengelola potensi dan kekayaan di daerahnya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyatnya (Mardikanto, 2013: 194). Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat senantiasa bertumpu pada pengelolaan dan pengolahan potensi sumber daya yang dimiliki oleh warga tersebut. Setiap wilayah biasanya akan memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Dan potensi yang berbeda-beda itulah kita bisa melakukan peningkatan kesejahteraan warganya.

Potensi unggulan yang dimiliki oleh Desa Magersari terutama di bidang industri rumah tangga antara yaitu industri pembuatan miniatur perahu, industri pembuatan capping kruduk, industri pembuatan kapal, industri pengolahan sampah plastik menjadi hiasan aquarium, pembuatan jala ikan. Hal ini tidak terlepas dari posisi geografis Desa Magersari yang dikelilingi oleh Sungai Bodri yang alirannya langsung menuju ke laut dan yang berperan penting dalam banyaknya potensi Desa Magersari adalah kreativitas dan keuletan warga.

“Warga Magersari itu orangnya kreatif-kreatif mbak, terbukti dari banyaknya industri rumah tangga seperti pembuatan miniatur perahu, pembuatan jala ikan yang semuanya berawal dari kreatifitas warga, Kecuali dengan industri rumah tangga pembuatan hiasan

aquarium dari sampah plastik. Namun sayangnya mereka terkendala dengan modal dan cara pemasarannya. (hasil wawancara dengan Bapak Muhyidin Selaku Kepala Desa Magersari, pada 3 Mei 2019)

B. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID)

Pemberdayaan adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (PERMENDAGRI, 2017: 7). Dalam hal ini Kegiatan program inovasi desa (PID) hadir sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-inovasi pembangunan desa serta merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal (Buku saku PID, 2017: 3).

Desa Magersari sendiri merupakan salah satu desa terkecil yang berada di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dengan penduduk sebesar 1.639 jiwa yang mayoritas merupakan berpencaharian sebagai nelayan (IDM 2019). Desa Magersari merupakan desa yang telah mengimplementasikan Program Inovasi Desa (PID) dalam APBes tahun 2019 melalui kegiatan bursa inovasi. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa (PID) dapat dilihat dari perbedaan kegiatan dalam APBDes Magersari dari segi ekonomi lokal, peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan pembangunan infrastruktur dasar.

Program Inovasi Desa (PID) Meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa, mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan dan membangun kapasitas Desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian Desa, sesuai dengan arah dan kebijakan dan sasaran Kementerian Desa PDTT pada RPJMN 2015-2019. Adapun proses yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran adalah tahap dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri. Pada tahap dimana pemerintah desa dan masyarakat akan diberikan wawasan, pengetahuan tentang program pemberdayaan. Kegiatan PID hadir sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-inovasi pembangunan desa serta merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal.

Pada pemberdayaan masyarakat melalui program inovasi desa (PID) tahap penyadaran dimulai dengan sosialisasi kepada

pendamping desa (PD) dan pemerintah desa dalam hal ini di hadiri oleh kepala Desa Magersari, Sekretaris desa dan anggota BPD melalui forum musyawarah antar desa (MAD) tahap 1 di aula Kecamatan Patebon .

Hasil dari MAD-I di Kecamatan di sampaikan ke pada masyarakat di desa-desa melalui musyawarah desa (MUSDES) yang pelaksanaannya diserahkan pada kebijakan pemerintah desa. Sosialisasi dilakukan tim pelaksana program inovasi desa (TPID) yang telah ditetapkan di masing-masing Kecamatan. Pada tahap ini TPID memberikan gambaran-gambaran bahwa kegiatan pembangunan di desa tidak hanya kegiatan yang bersifat infrastruktur saja, semisal pembangunan jalan rabat beton dan talud, akan tetapi ada kegiatan yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan musdes di Desa Magersari dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 di balai desa Magersari yang dihadiri oleh pemerintah desa, Ketua RT, Ketua RW, kader desa, anggota BPD, perwakilan karang taruna, kelompok masyarakat dan pendamping desa. Kegiatan ini didampingi oleh TPID dan Pendamping lokal desa (PLD).

Dalam kegiatan musdes di Desa Magersari, selain untuk mensosialisasikan tentang program inovasi desa (PID), TPID juga memberikan pengetahuan tentang potensi-potensi yang bisa dikembangkan di Desa Magersari, salah satunya masalah sampah. Sampah jika di olah dengan bijaksana akan dapat meningkatkan

perekonomian warga. Dari sini ada beberapa warga yang mengusulkan untuk pengolahan sampah plastik dan pembuatan bak sampah untuk TPU. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Isma selaku pendamping desa di Desa Magersari menyampaikan bahwa:

“Dengan adanya kegiatan bursa inovasi desa melalui PID, pemerintah desa mulai tergerak untuk lebih memperhatikan kebutuhan kesejahteraan warganya mbak. Di Magersari, Dulu DD hanya digunakan untuk membangun jalan dan pavingisasi, sampe-sampe ndak ada jalan rusak di Magersari. hampir semua jalan bagus sampe jalan RT dan Rw semua mulus mbak, padahal di Desa Magersari sendiri ada satu permasalahan yang cukup kompleks yaitu tidak adanya tempat pembuangan sampah atau TPU mbak, jadi warga Magersari membuang sampah ke TPU luar desanya. Melalui kegiatan bursa inovasi desa tahun 2018 kemarin, pemerintah Desa Magersari mulai membuka pikiran dan lebih memperhatikan kebutuhan warganya, salah satunya dengan me-replikasi kegiatan pembangunan bak sampah.(Hasil wawancara pada : Jumat, 3 Mei 2019)

Menurut APBDes 2018 di Desa Magersari penggunaan dana desa (DD) pada tahun 2018 sebesar Rp. 706.182.000.00,- hanya fokus dengan pembangunan infrastruktur yaitu pembuatan rabat beton, pavingisasi dan talut tanpa memperhatikan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat (Siskeudes 2018). Hal ini menjadikan masyarakat kurang merasakan hasil penggunaan DD dari pemerintah. Menurut Bapak Abdul Basit selaku Sekretaris Desa magersari, pada wawancara Hari Kamis, 14 Nopember 2019.

“Dulu sebelum program PID hadir, warga dalam mengusulkan kegiatan dalam RAPBDes hanya sebatas pembangunan infrastruktur saja seperti pavingisasi di jalan RW, rabat beton dan pembuatan talut. Namun setelah mengikuti kegiatan bursa inovasi di Desa Sambung sari Kecamatan Weleri Tahun 2018, pemerintah desa mulai menggerakkan warga untuk lebih membuka pikiran. melalui kegiatan saling tukar inovasi sehingga muncullah ide-ide dan gagasan dari warga untuk mulai membangun bak sampah penampungan warga, memulai perekonomian warga melalui BUMDes, membangun sarana-prasarana olahraga dan membangun TK dan TPQ serta peningkatan kapasitas untuk guru TK dan TPQ dan masih banyak lagi mbak”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Program Inovasi desa (PID) dapat memberikan penyadaran bahwa dana desa seharusnya lebih terfokus pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan tersedianya sarana prasarana yang dapat menunjang perekonomian warga berarti dapat meningkatkan potensi ekonomi lokal di Desa Magersari.

2. Tahap Pengkapasitasan

Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Pengkapasitasan adalah cara melihat kapasitas pelaku dan pelaksanaa program inovasi desa (PID). Dalam hal ini peningkatan kapasitas pemerintah desa dan warga Desa Magersari dilaksanakan ketika kegiatan bursa inovasi desa dan pasca bursa inovasi desa. Dalam bursa inovasi desa dilakukan kegiatan tukar menukar pengetahuan atau informasi

mengenai inovasi atau ide-ide kegiatan pemberdayaan baik dalam lokal desa maupun dalam tingkat nasional. Bursa Inovasi dilakukan di tingkat Kabupaten yang pada Tahun 2018, kegiatan bursa inovasi desa dilakukan di Desa Sambung sari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

Kegiatan bursa inovasi desa dihadiri oleh tiga perwakilan di tiap desa yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat. Dalam kegiatan bursa inovasi Desa Magersari diwakili oleh bapak Abdul Basit selaku Sekretaris Desa, Bapak Suratman perwakilan tokoh desa dan Abdul Samad yang diutus oleh BPD.

Dalam kegiatan pengkapasitasan desa melalui bursa inovasi Desa Magersari melakukan kegiatan komunikasi tentang kebutuhan dan potensi dengan desa lain se-Kabupaten Kendal, permasalahan yang ada di Desa Magersari antara lain, banyak potensi ekonomi warga yang belum dikelola dengan baik, warga masih bingung dalam mengelola sampah, belum ada saran prasarana pendidikan TK dan Madrasah non formal dan sarana-prasarana olahraga.

“Ada beberapa permasalahan yang ada di Desa Magersari mbak, salah satunya tentang sampah dan di bidang pendidikan. Saran dari TPID dulu untuk peningkatan kapasitas pengajarnya, dan pengolahan sampah terpadu dengan pembuangan bak sampah”. (Hasil wawancara pada Bapak Suratman pada hari Jum’at, 14 Nopember 2019)

Dalam kegiatan bursa inovasi juga diberi arahan dalam menentukan kebijakan dan *problem solving* atau pemecahan masalah atas kebutuhan yang disampaikan oleh perwakilan desa dan ide atau saran pelatihan-pelatihan yang tujuannya meningkatkan ekonomi. Pada pemecahan masalah yang disampaikan oleh TPID antara lain, membangun bak sampah penampungan dan pengadaan sarana prasarana olahraga, meningkatkan kapasitas Guru TK dan Madrasah non formal.

Tahap pemberian kapasitas melalui program inovasi desa (PID) pasca bursa inovasi adalah pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan perekonomian lokal warga. Pemberian kapasitas ini dilakukan dengan memberikan pelatihan usaha kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dalam hal ini adalah ibu rumah tangga yang diberikan pelatihan menjahit, dalam hal ini TPID bekerja sama dengan BLK Kabupaten Kendal. Selain itu, PID juga mengajak kelompok masyarakat pemilik usaha yang memiliki usaha untuk diberikan ketrampilan dalam hal pemasaran produk. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Suratman pada Hari Jum'at 20 Desember 2019

“Sebenarnya industri rumah tangga yang saya geluti ini sangat menjanjikan mbak, tapi karena kita bingung untuk menjualnya jadi produksi ini kurang menjanjikan. Selama ini kita jual produk kepada tengkulak yang dihargai rendah, padahal kalau kita lihat harga di swalayan produk kami bisa menjadi 3x lipat dari harga yang di tawarkan oleh pengepul, melalui pelatihan pemasaran produk dari

pemerintah desa, produk hiasan aquarium dari Desa Magersari menjadi terkenal dan masuk bisa masuk ke swalayan Aneka Jaya Kendal, jadi kita bisa mendapatkan laba yang lebih banyak”

Tahap pemberian kapasitas untuk peningkatan sumberdaya manusia oleh TPID di Desa Magersari adalah dengan pelatihan peningkatan kapasitas kader pembangun manusia (KPM). Anggota KPM yang dipilih dari melalui musdes bertugas untuk membantu pemerintahan desa. KPM diberikan pelatihan agar menjadi pribadi yang memiliki kapasitas dan terlatih dalam membantu pemerinta desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia yang ada di Desa Magersari.

“Dulu kader desa setelah keluar SK Kepala desa ya Cuma nama saja mba untuk formalitas, tau nya kami ya kami tugasnya Cuma nimbangi pas posyandu saja, tapi setelah diadakan pelatihan KPM, kami tau cara melayani warga, dan menjadi kader yang baik”(wawancara pada bu Ma'in selaku kader desa di Desa Magersari pada hari Jum'at, 20 Desember 2019)

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui pemberdayaan yang dilakukan PID untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia adalah dengan pelatihan kader pembangun manusia (KPM).

3. Tahap Pendayaan

Tahap ketiga adalah pendayaan. Pendayaan diartikan sebagai peluang daya, kekuasaan yang diberikan pada Masyarakat. Dalam Hal ini PID memberi kekuasaan penuh pada desa untuk memilih kegiatan yang hendak dimasukkan kedalam RAPBDes di Desanya. Desa Magersari di berikan kekuasaan penuh untuk melaksanakan dan mengambil ide atau inovasi yang telah di tawarkan oleh TPID dan menganggarkan kegiatan tersebut dalam APBDes Magersari tahun selanjutnya. Di bawah ini adalah Bagan APBDes Magersari tahun 2019 sebagai bukti implementasi PID dalam Desa magersari:

Gambar. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Magersari TA 2019 bidang pemberdayaan masyarakat

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH DESA MAGERSARI KECAMATAN PATEBON				
TAHUN ANGGARAN 2019				
Bidang	: 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
Sub Bidang	: 4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
Kegiatan	: 4.6.01. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)			
Waktu Pelaksanaan	: 1 Tahun			
Output/Keluaran	: Terbentuknya BUMDesa			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
1	2	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
3		4	5	
5.	BELANJA			5.000.000,00
4.06.01	<i>di Pembentukan BUMDesa</i>			5.000.000,00
5.2.7.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			5.000.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			440.000,00
	01. Kertas HVS	DDS	5 Rim	45.000,00
	02. Stapler	DDS	2 Buah	15.000,00
	03. Isi Stapler	DDS	1 Pack	15.000,00
	04. Blender Ktp	DDS	1 Dus	30.000,00
	05. Stopmap Folio	DDS	20 Buah	1.000,00
	06. Snelhecter Folio	DDS	20 Buah	1.000,00
	07. Bolpoint Standart	DDS	2 Pack	20.000,00
	08. Amplop Besar	DDS	2 Pack	30.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60.000,00
	01. Foto Copy	DDS	300 Lembar	200,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00
	01. Snack Rapat Mudes Sosialisasi Pembentukan BUMDes	DDS	60 Dus	10.000,00
	02. Makan Rapat Mudes Sosialisasi Pembentukan BUMDes	DDS	60 Dus	15.000,00
	03. Snack Rapat Mdes Pembentukan Tim Penyusun AD/ART	DDS	60 Dus	10.000,00
	04. Makan Rapat Mdes Pembentukan Tim Penyusun AD/ART	DDS	60 Dus	15.000,00
	05. Snack Rapat Mudes Pembentukan BUMDesa	DDS	60 Dus	10.000,00
	06. Makan Rapat Mudes Pembentukan BUMDesa	DDS	60 Dus	15.000,00
	JUMLAH (Rp)			5.000.000,00

Sumber: Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) Magersari (diunduh pada Selasa, 26 Nopember 2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa APBDes Magersari mengalokasikan dana sebesar Rp. 5.000.000.00,- untuk pengembangan BUMDesa. Berdirinya BUMDes sendiri merupakan hasil replikasi dari ide atau inovasi yang didapatkan dalam kegiatan bursa inovasi pada PID tahun anggaran 2018. Dengan berdirinya BUMDes yang di beri nama “BUMDES Berkah Jaya”. BUMDes Berkah Jaya ini berperan penting untuk pengelolaan kegiatan hasil dari replikasi inovasi yang bersifat pelatihan-pelatihan untuk peningkatan perekonomian warga.

“Jadi warga yang ikut pelatihan itu dilaksanakan di bawah naungan BUMDEs mbak, tujuannya agar lebih terkoordinir. Ya meskipun warga yang sudah memiliki industri rumah tangga seperti hiasan aquarium dari sampah plastik dan miniatur kapal itu juga tetap di koordinir oleh BUMdes, tujuannya untuk membantu peningkatan pemasaran produknya mbak”. (Hasil wawancara dengan Ibu Syahadah Isma, pada hari Kamis, 14 Nopember 2019).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengembangan BUMDes sangat penting untuk perwujudan tujuan PID di bidang peningkatan ekonomi lokal.

Kegiatan hasil replikasi inovasi yang lain adalah penyelenggaraan peningkatan kapasitas guru TK dan Madrasah non formal milik Desa. Peningkatan kapasitas di Anggarkan dalam APBDes dalam rangka perwujudan tujuan peningkatan sumberdaya manusia. Peningkatan kapasitas ini meliputi honor, belanja pakaian

dll. Sebagaimana Tabel di bawah ini, untuk peningkatan kapasitas di bidang pendidikan menggunakan dana sebesar Rp. 18.200.000.

Gambar. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Magersari TA 2019 Bidang pelaksanaan pembangunan desa

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH DESA MAGERSARI KECAMATAN PATEBON				
TAHUN ANGGARAN 2019				
Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
Sub Bidang : 2.1. Sub Bidang Pendidikan				
Kegiatan : 2.1.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)				
Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun				
Output/Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan PAUD/TK/TPQ/MDA Milik Desa				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			18.200.000,00
<u>2.01.01</u>	<u>01 Honor Guru Madrasah "Miftahul Athfal"</u>			<u>12.600.000,00</u>
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.600.000,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			12.600.000,00
	01. Honor Guru Madrasah "Miftahul Athfal" DDS	21 Orang/Tahun	600.000,00	12.600.000,00
<u>2.01.01</u>	<u>02 Honor Guru TPQ "NURUL HUSNA"</u>			<u>3.600.000,00</u>
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.600.000,00
	01. Honor Guru TPQ "NURUL HUSNA" DDS	6 Orang/Tahun	600.000,00	3.600.000,00
<u>2.01.01</u>	<u>03 Honor Guru TK "TRIYOSO"</u>			<u>2.000.000,00</u>
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.000.000,00
	01. Honor Guru TK "Triyoso" DDS	2 Orang/Tahun	1.000.000,00	2.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			18.200.000,00

Sumber: Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) Magersari (diunduh pada Selasa, 26 Nopember 2019)

Hasil replikasi inovasi untuk bidang pembangunan infrastruktur dasar adalah pembangunan bak sampah sebagai sarana pengelolaan sampah terpadu. Untuk pengelolaan sampah di Desa Magersari dilaksanakan dengan cara pemisahan sampah antara sampah organik dan non organik. Sampah organik sendiri adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami, sedangkan sampah non organik adalah sampah yang sudah tidak dapat dipakai lagi dan sulit terurai seperti plastik, kaca, dan sterofom. Untuk semua sampah yang berbahan plastik dipisahkan dengan sampah organik, kemudian sampah plastik dikumpulkan dirumah bapak Suratman selaku pemilik usaha hiasan aquarium dari plastik. dan untuk sampah organiknya dibuang di bak penampungan.

“untuk sampah warga di Desa Magersari niki sudah paham mbak, sampah plastik di pisahke lan dikumpulke, semua plastik plastik apa saja. Kalau sudah banyak mereka antar ke tempat saya dengan Cuma-Cuma atau gratis mbak. Kadang juga ada tengkulak pemulung yang menjual sampah plastiknya kesaya, tapi jarang sekali. Karena sampah plastik dari warga juga sudah memenuhi kebutuhan buat damel hiasan mbak” (Hasil wawancara dengan pak Suratman pelaku usaha pembuatan hiasan aquarium pada Hari Kamis, 14 Nopember 2019)

Untuk pengolahan sampah organik di Desa Magersari masih diperlukan banyak kajian, hal ini dapat diketahui dari hasil

wawancara dengan Bapak Muhyidin selaku Kepala Desa Magersari
Pada Hari Kamis, 14 Nopember 2019:

“Untuk pengolahan sampah plastik atau sampah organik dapat di buat menjadi hiasan aquarium mbak, tapi untuk masalah sampah organik warga masih belum menemukan solusi, selama ini mereka membuang di tong sampah dan diambil oleh petugas kebersihan lalu sampahnya dibuang diluar Desa. Pemerintah juga belum konsen dan masih harus megkaji lagi pengolahan sampah organik di Desa Magersari. Kemudian ketika penawaran kegiatan kita masukkan masalah sampah tersebut dan diberi saran oleh anggota TPID untuk membuat bak sampah”.

Hasil replikasi inovasi dalam hal pengelolaan sampah terpadu dianggarkan dalam APBDEs sebagaimana di bawah ini:

Gambar. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Magersari TA 2019 bidang pelaksanaan pembangunan desa

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH DESA MAGERSARI KECAMATAN PATEBON				
TAHUN ANGGARAN 2019				
Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
Sub Bidang : 2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman				
Kegiatan : 2.4.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)				
Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun				
Output/Keluaran : Terbangunnya Fasilitas Pengelolaan Sampah				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			82.601.700,00
2.04.15	<u>01 Pembangunan Bak Sampah Bebasis Desa</u>			37.401.700,00
5.3.7.	<u>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan</u>			37.401.700,00
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Idl - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			550.000,00
	01. Honor Pelaksana Kegiatan	1 OK	175.000,00	175.000,00
	02. Honor Ketua TPK	1 OK	150.000,00	150.000,00
	03. Honor Sekretaris TPK	1 OK	125.000,00	125.000,00
	04. Honor Anggota TPK	1 OK	100.000,00	100.000,00
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Idl - Upah Tenaga Kerja			8.930.000,00
	01. Upah Pekerja	74 HOK	80.000,00	5.920.000,00
	02. Upah Tukang	30 HOK	95.000,00	2.850.000,00
	03. Upah Pekerja Lansiran	2 HOK	80.000,00	160.000,00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Idl - Bahan Baku/Material			27.921.700,00
	01. Batu Belah	12 m3	330.000,00	3.960.000,00
	02. Batu Pecah 1/2	1 m3	350.000,00	350.000,00
	03. Pasir Beton/pasang	10 m3	375.000,00	3.750.000,00
	04. Pasir Urug	10 m3	125.000,00	1.250.000,00
	05. Tanah Urug	13,5 m3	60.000,00	810.000,00
	06. Semen (50 kg)	40 zak	65.000,00	2.600.000,00
	07. Batu Bata	2.940 Buah	800,00	2.352.000,00
	08. Besi beton 6 mm	19,95 Batang	30.000,00	598.500,00
	09. Besi Beton 10 mm	22,05 Batang	80.000,00	1.764.000,00
	10. Bendrat	5 kg	20.000,00	100.000,00
	11. Papan begesting	20 Lembar	25.000,00	500.000,00
	12. Paku	5 kg	18.000,00	90.000,00
	13. Plamir tembok	8,4 kg	10.000,00	84.000,00
	14. Cat Tembok	21,84 kg	80.000,00	1.747.200,00
	15. Pintu Geser Besi	1 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00
	16. Ember Cor	10 Buah	6.000,00	60.000,00
	17. Benang	2 Gulung	3.000,00	6.000,00
	18. Papan Proyek	1 Ls	100.000,00	100.000,00
	19. Prasasti	1 Ls	300.000,00	300.000,00
2.04.15	<u>02 Penedaan Tong Sampah</u>			45.200.000,00
5.3.7.	<u>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan</u>			45.200.000,00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Idl - Bahan Baku/Material			45.200.000,00
	01. Tong Sampah	400 Unit	113.000,00	45.200.000,00

Sumber: Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) Magersari (diunduh pada Selasa, 26 Nopember 2019)

Untuk tahap pendayaan ini, pemerintah desa juga memberikan perhatian bagi pemuda dan karang taruna, melalui kegiatan Program Inovasi Desa (PID) dianggarkan kegiatan sebagai berikut:

Gambar. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Magersari TA 2019 bidang pemberdayaan masyarakat

3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	16.679.500,00
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	14.679.500,00
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	14.679.500,00
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00

Sumber: Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) Magersari (diunduh pada Selasa, 26 Nopember 2019)

Untuk replikasi inovasi di bidang kesehatan adalah penggunaan dana desa untuk pengadaan posyandu, pengadaan alat-alat kesehatan dan pemberian makanan tambahan sebesar Rp. 30.831.500.

Gambar. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Magersari TA 2019 bidang pelaksanaan pembangunan desa

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH DESA MAGERSARI KECAMATAN PATEBOH				
TAHUN ANGGARAN 2019				
Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan				
Kegiatan : 2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)				
Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun				
Output/Keluaran : Terselenggaranya Posyandu				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			30.831.500,00
<u>2.02.02</u>	<u>01 Penyelenggaraan Posyandu</u>			<u>10.831.500,00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Porlengkapan			241.500,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			174.000,00
	01. Buku F4	ADD	3 Buah	51.000,00
	02. Buku	ADD	2 Pak	36.000,00
	03. Bolpoint	ADD	2 Pack	48.000,00
	04. Penggaris	ADD	3 Buah	7.500,00
	05. Tipe Ex	ADD	3 Buah	13.500,00
	06. Materai 6000	ADD	3 Lembar	18.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			67.500,00
	01. Foto Copy	ADD	300 Lembar	67.500,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.480.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			6.480.000,00
	01. Insentif Kader Posyandu RW I	DDS	84 OK	2.520.000,00
	02. Insentif Kader Posyandu RW II	DDS	72 OK	2.160.000,00
	03. Insentif Kader Posyandu Lansia	DDS	60 OK	1.800.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			960.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			960.000,00
	01. Transport Perjalan Dinas Ke Kecamatan	ADD	12 OK	600.000,00
	02. Transport Perjalan Dinas Ke Puskesmas	ADD	12 OK	360.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.150.000,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			1.200.000,00
	01. Meja Posyandu	DDS	3 Unit	1.200.000,00
5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan			1.950.000,00
	01. Alat Cek Gula Darah	DDS	3 Pak	300.000,00
	02. Alat Cek Kolesterol	DDS	3 Pak	450.000,00
	03. Alat Cek Asam Urat	DDS	3 Pak	1.200.000,00
<u>2.02.02</u>	<u>02 Program Pemberian Makanan Tambahan</u>			<u>20.000.000,00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Porlengkapan			20.000.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			20.000.000,00
	01. Belanja PMT Posyandu RW I	PBP	912 OK	5.472.000,00
	02. Belanja PMT Posyandu RW II	PBP	780 OK	4.680.000,00
	03. Belanja PMT Posyandu Lansia	PBP	900 OK	4.500.000,00
	04. Belanja PMT Anak BGM/BGT	PBP	5 OK	1.500.000,00
	05. Belanja PMT Anak Stunting	PBP	5 OK	1.500.000,00
	06. Belanja PMT Ibu Hamil	PBP	3 OK	900.000,00

Sumber: Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) Magersari
(diunduh pada Selasa, 26 Nopember 2019)

Tahap pemberian daya dalam PID selain desa di beri kekuasaan untuk melakukan replikasi pada RAPBDes nya, PID juga memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk mengaspirasikan kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam mengupayakan dirinya serta kesempatan yang diberikan oleh pemerintah desa dalam menyampaikan aspirasinya yang kurang saat ini mulai diaktifkan, berinteraksi dengan masyarakat dengan adanya sosialisasi Program Inovasi Desa kemudian dalam forum musyawarah desa (Musdes) yang dihadiri oleh seluruh keterwakilan masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi di Desa. Kemudian tim mulai menganalisa permasalahan dan dirumuskan penyelesaian bersama. Disini menekankan partisipasi masyarakat dalam memberikan suara dan pendapat.

Dengan semakin meningkatkan interaksi dengan masyarakat, mengajak masyarakat dan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. maka dari itu peran serta masyarakat, kelompok-kelompok usaha, dan nelayan berani menyuarakan apa yang menjadi permasalahan mereka. Dalam pelaksanaannya, proses ini tidak otomatis berjalan, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar baik yang bekerja pendampingan dalam Program Inovasi Desa

menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan secara ekonomi.

4. Tahap *Networking*

Pada tahap *networking* dapat diketahui bahwa program inovasi desa (PID) membuka jaringan atau informasi melalui bursa inovasi desa. Dalam hal ini desa Magersari mencari contoh-contoh desa yang sama dengan kebutuhan dan permasalahannya.

“Melalui fasilitasi dari tim program inovasi desa (TPID) permasalahan mengenai sampah Sdilaksanakan dengan pengadaan pengolahan sampah terpadu, pas kegiatan bursa inovasi difasilitasi untuk bertemu dengan desa-desa yang memiliki permasalahan yang sama, pas itu kami bertukar pengalaman dengan Desa Penanggulangan Kecamatan Pegandon mbak. Di sana juga hanya dapat megolah sampah plastik menjadi bio solar, dan sampah rumah tangga hanya dibuang di bak penampungan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Muhyidin Pada Hari Kamis, 14 Nopember 2019).

Selain melalui kegiatan bursa inovasi, PID juga membuka jaringan untuk masyarakat melalui kerja sama dengan berbagai instansi, seperti balai latihan kerja (BLK) untuk peningkatan kapasitas manusia dan Dinas kesehatan untuk mendukung kegiatan pengadaan posyandu dan posbindu. Sedangkan *networking* untuk bidang peningkatan ekonomi adalah dengan melakukan kerja sama antara kelompok desa dengan swalayan aneka jaya untuk mendistributorkan produk pengolahan sampah menjadi hiasan aquarium. Selain itu, pemerintah desa melalui PID juga mengajak kelompok usaha yang ada di Desa Magersari untuk menjadi

kelompok usaha yang berada di bawah naungan BUMdes Berkah Jaya yang ada di Magersari.

5. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilaksanakan oleh Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa yang biasa disebut dengan P2KTD. P2KTD merupakan salah satu komponen dalam PID yang bertugas untuk melengkapi kebutuhan Pendampingan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Desa, membantu desa mewujudkan komitmen replikasi inovasi desa, dan untuk memperkuat kapasitas teknis pemerintah desa dan mempersiapkan Kader Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Tahapan evaluasi di Desa Magersari dilakukan pasca bursa inovasi desa, yaitu pada musyawarah desa (musdes) penetapan RKPBDes Tahun anggaran 2019 pada Tanggal 5 Juli 2018. P2KTD mengawal komitmen inovasi desa yang telah dipilih di kegiatan bursa inovasi desa kemudian di rumuskan kedalam RAPBDes.

“Dari PID juga ikut memonitoring hasil komitmen inovasi mbak, jadi tak serta merta di tinggalkan pasca pelaksanaan BID. P2KTD juga ikut ketika Musdes ke 4 tentang pembahasan RAPBDes berdasarkan RKPBDes. Tim P2KTD membantu penyusunan RAPBDes menyesuaikan dengan penganggaran dan membantu untuk memprioritaskan kegiatan” (wawancara dengan Bapak Muhyidin selaku Kepala Desa Magersari pada Hari Kamis, 14 Nopember 2019).

Dalam tahap evaluasi P2KTD juga berperan sebagai pihak yang melakukan pelatihan. Fasilitasi dan pelatihan diberikan apabila

masyarakat menemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan APBDes tahun anggaran berjalannya, Semisal dalam kegiatan pengadaan BUMdes tentunya dibutuhkan pelatihan untuk pembentukan dan pengelolaan itu sendiri.

Gambar. 7: Pelaksanaan kegiatan pelatihan pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Desa Magersari oleh P2KTD



Sumber: Dokumen Desa Magersari

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) Di Desa Magersari Kecamatan Patebon

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor yang dibutuhkan dalam suatu proses pemberdayaan, faktor pendukung ini diperlukan

untuk tercapainya tujuan dari program tersebut. Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh penulis ada beberapa faktor pendukung yang disampaikan oleh Bapak Basit dalam wawancara sebagai berikut:

“Faktor pendukungnya ya banyak mbak, selain warga Desa Magersari yang kreatif, mereka juga tak menutup diri dari program-program pembaharuan dan pemberdayaan yang datang dari pemerintah dan pihak swasta”. (Hasil wawancara pada Bapak Basit Pada Hari Kamis, 14 Nopember 2019).

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Suratman selaku pelaku usaha pembuatan hiasan dari aquarium.

“faktor pendukungnya adalah warga mulai sadar untuk peningkatan ekonominya mbak, sehingga ketika dulu pertama kali ada pelatihan pengolahan sampah plastik menjadi hiasan aquarium, warga mulai antusias, apalagi bahan bakunya berasal dari limbah, jadi selain mendapatkan penghasilan tambahan warga juga dapat mengurangi limbah plastik mbak”. (Hasil wawancara pada, 14 Nopember 2019)

Faktor pendukung yang lain disampaikan oleh Bapak Syarif selaku TPID di Kecamatan Patebon Pada Hari Jum'at, 15 Nopember 2019.

“Kegiatan PID sebenarnya jika dimanfaatkan dengan baik, bisa dijadikan peluang mbak, peluang untuk masyarakat untuk lebih memanfaatkan Dana Desa, peluang untuk membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja baru, dan peluang untuk memajukan produk unggulan desa. Selain itu, Program inovasi desa juga di dukung dengan pelaku PID yang terlatih dan profesional, agar PID berjalan

sesuai dengan tujuan awal. Pemerintah juga memfasilitasi rapat koordinasi, baik itu berjenjang kecamatan maupun kabupaten dan fasilitasi atas kegiatan musyawarah desa (MUSDES) dan musyawarah antar desa (MAD)”.

Dari hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pendukungnya antara lain:

- a) Kreatifitas dan semangat warga atas program pemberdayaan sebagai respon positif dari warga, sehingga adanya motivasi dan dorongan untuk mengikuti kegiatan.
 - b) Peluang untuk membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja baru, dan peluang untuk memajukan produk unggulan desa.
 - c) Dukungan dan perhatian penuh dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat.
 - d) Peluang untuk masyarakat agar lebih memanfaatkan dana desa (DD) dengan kegiatan yang lebih inovatif.
 - e) Peningkatan kapasitas pelaku PID dilaksanakan oleh tim yang profesional dan terlatih agar PID berjalan sesuai tujuan awal.
 - f) Dukungan fasilitasi rapat koordinasi, baik itu berjenjang kecamatan maupun kabupaten dan fasilitasi atas kegiatan musyawarah desa (MUSDES) dan musyawarah antar desa (MAD)
2. Faktor Penghambat

Dalam suatu kegiatan pemberdayaan atau program pemberdayaan tentu pernah mengalami hambatan-hambatan yang

mengakibatkan kegiatan tersebut berjalan tidak sesuai harapan yang telah direncanakan. Begitu juga pemberdayaan yang melalui Program Inovasi Desa (PID) tentunya pernah mengalami suatu kendala dan hambatan-hambatan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syarif dalam wawancara sebagai berikut:

“Faktor penghambat pelaksanaan Program PID ini adalah salah satunya Kebijakan pemerintah Desa Magersari yang masih terfokus pada pembangunan infrastruktur, seperti rabat beton, pavingisasi dan pembangunan talud tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat akan kesejahteraan dan pemberdayaan” (wawancara Pada Hari Jum’at, 15 Nopember 2019).

Faktor penghambat lain yang disampaikan oleh Bapak Muhyidin selaku Kepala Desa Magersari dalam wawancara pada Hari Kamis, 14 Nopember 2019 adalah sebagai berikut:

“faktor penghambatnya program inovasi desa ini salah satunya proses sosialisasi informasi dan inovasi PID sangat singkat mbak, jadi dari pemerintah desa kurang persiapan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada didesa”

Bapak Basit juga menyampaikan tentang faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui program inovasi desa sebagaimana wawancara di bawah ini:

“Rumitnya pelaporan dan teknis pelaksanaan program inovasi desa ini membuat pemerintah desa lebih memilih bekerja sama dengan pihak swasta dibanding dengan pihak pemerintah mbak, misalnya dalam kegiatan memajukan produk unggulan desa, jika kita berkerja sama dengan pihak swasta pelaporan hanya sebatas bukti pelaksanaan

kegiatan, namun jika melalui kerja sama dengan pemerintah, kita harus melakukan pelaporan secara terperinci dan detail” (wawancara Pada Hari Kamis, 14 Nopember 2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan pemerintah Desa Magersari yang masih terfokus pada pembangunan infrastruktur, seperti rabat beton, pavingisasi dan pembangunan talud tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat akan kesejahteraan dan pemberdayaan.
- b) Proses sosialisasi kegiatan Program Inovasi Desa (PID) kepada pemerintah desa berjalan sangat singkat.
- c) Terdapat beberapa perbedaan atau perubahan pengaturan maupun konsep PID.
- d) Minimnya alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Magersari.
- e) Untuk menyentuh pada lapisan masyarakat, pemberdayaan melalui PID harus melalui banyak proses.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) Di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

Pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai suatu tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Di dalam bab IV ini merupakan pembahasan dari data atau hasil penelitian yang telah penulis jelaskan dalam bab III. Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dimana sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer peneliti peroleh secara langsung dari informan melalui wawancara, sedangkan sumber data sekunder yang diperoleh melalui data pendukung seperti buku, dokumen, catatan

hasil survei, petunjuk teknis pelaksanaan dan lain sebagainya. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi, wawancara terstruktur yang telah disiapkan dan observasi secara terus terang dan tersamar, jadi penulis akan menjelaskan kepada informan maksud dan tujuan datang ke Kecamatan Patebon desa Magersari dan DISPERMASDES Kabupaten Kendal, tetapi sewaktu-waktu penulis menggunakan observasi secara tersembunyi. Untuk menganalisis data penulis menggunakan teorinya Sugiyono 2013 yaitu data reduksi penyajian data dan kesimpulan.

Berdasarkan data hasil penelitian maka dapat dideskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa di Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang dikaji menggunakan teori pokok pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2017: 114) yakni Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan sebagai berikut:

1. Bina Manusia

Upaya bina manusia dalam Program Inovasi Desa (PID) adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan atau pengembangan kapasitas yaitu pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan. Pengembangan kapasitas individu yang dilihat dari segi pengembangan SDM melalui investasi jangka panjang yakni pendidikan dan kesehatan.

Upaya dalam membina manusia dalam Program Inovasi Desa dilakukan di Desa Magersari dengan melihat masyarakat Desa Magersari hanya memiliki minat yang rendah terhadap pendidikan karena kebutuhan sarana pendidikan yang kurang. Faktor letak Desa Magersari yang jauh dengan sektor pendidikan serta biaya pendidikan yang mahal inilah yang menyebabkan sebagian besar masyarakat Desa Magersari yang hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga tamat Sekolah Dasar (SD). Selain faktor letak sekolah dengan Desa Magersari juga dipengaruhi oleh rendahnya minat belajar masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan masyarakat, banyak sekali anak-anak dalam usia sekolah memilih untuk menjadi nelayan. Pemanfaatan Dana Desa dalam bidang pendidikan digunakan untuk menyediakan tempat untuk TK dan TPQ dan kebutuhan di lembaga tersebut termasuk alat bermain dan buku serta honorium pengajar.

Selain itu juga memprakarsai peningkatan kualitas bidang kesehatan di Desa Magersari. Sebagai langkah mempersiapkan SDM yang berkualitas baik dari sisi pendidikan dan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan fokus pada upaya promotif dan preventif dan ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sepakat dalam berkoordinasi untuk pemanfaatan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan kesehatan disalurkan untuk posyandu,

pelatihan dan pengembangan kader kesehatan masyarakat, pengadaan alat-alat kesehatan, pengadaa program pemberian makanan tambahan yang dianggarkan kedalam APBDes Tahun anggaran 2019 sebesar. Rp. 30.831.500.

2. Bina Usaha

Bina usaha dalam Program Inovasi Desa (PID) menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan yang memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi atau non ekonomi). Bina usaha mencakup pemilihan Komoditas jenis usaha potensi lokal daerah yang dapat dimaksimalkan produksinya sebagai komoditi unggulan dengan perencanaan pengembangan usaha masyarakat yang memprakarsai pembentukan badan usaha sebagai manajemen bisnis yang baik dan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat lokal.

Terbatasnya kemampuan para pelaku usaha karena infrastruktur yang kurang memadai juga keterbatasan untuk meningkatkan kuantitas produk, nilai tambah (*value added*) lemah karena biasanya dijual ke pengepul dan tengkulak saja. Belum ada kemauan dan kemampuan masyarakat dalam bidang pemasaran yang bertujuan agar dapat dijual dengan harga yang lebih dan memiliki nilai tambah.

Mengatasi permasalahan hal tersebut Kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan memberikan pelatihan usaha di

Desa Magersari kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dalam hal ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang diberikan pelatihan menjahit. Pelatihan ini juga mengajak kelompok masyarakat pemilik usaha industri rumah tangga pembuatan miniatur kapal dan hiasan aquarium. Pelatihan yang diberikan untuk pemilik industri rumah tangga adalah pelatihan mengenai pemasaran produk. Dengan penggunaan Dana Desa. Memberikan pelatihan usaha ini memberikan dampak bagi masyarakat semakin gencar mendirikan usaha kecil dengan memanfaatkan potensi alam yang ada.

3. Bina Kelembagaan

Bina kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat yang merupakan menguatkan peran- peran masyarakat dalam mewujudkan program pemberdayaan yang dapat mensejahterakan masyarakat Program Inovasi Desa menumbuhkan peran masyarakat agar dapat memberikan suara dan kesempatan dalam Musyawarah Desa untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau ketidakberdayaan masyarakat menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri. Masyarakat sebagai subjek pemberdayaan merupakan kunci keberhasilan Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan yakni peran masyarakat serta pemerintah Desa serta seluruh stakeholder dalam hal ini yang memiliki tujuan yang

sama yakni kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan.

Pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Magersari juga didukung oleh unsur kelembagaan yang terdiri dari: Pemerintah Desa (Pemdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW).

Sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam mengupayakan dirinya serta kesempatan yang diberikan oleh pemerintah desa dalam menyampaikan aspirasinya yang kurang saat ini mulai diaktifkan, berinteraksi dengan masyarakat dengan adanya sosialisasi Program Inovasi Desa kemudian ada Musyawarah Desa yang dihadiri oleh seluruh keterwakilan masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi di Desa. Kemudian tim mulai menganalisa permasalahan dan dirumuskan penyelesaian bersama. Di sini menekankan partisipasi masyarakat dalam memberikan suara dan pendapat.

Bina kelembagaan ditandai dengan aktifnya peran Pemerintah Desa, BPD dan karang taruna. Keterlibatan karang taruna sebagai promotor pembangunan desa serta PKK dalam mengembangkan peran pemberdayaan keluarga di Desa Magersari yang bahu membahu menyumbangkan pikiran, tenaga

dan waktu dalam menyelesaikan permasalahan serta pendapat tentang penggunaan Dana Desa. Keberhasilan bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dipengaruhi oleh ketersediaan dan efektivitas kelembagaan yang sebelumnya tidak bersinergi secara optimal.

Dalam hal ini keterlibatan masyarakat tidak hanya sekedar memenuhi pedoman dan mobilisasi tetapi sudah pada tingkat partisipasi aktif dan mampu menjawab isu-isu strategis di Desa Magersari. Sehingga dalam hasil Musyawarah Desa sebagai dasar penentuan kegiatan Program Inovasi Desa (PID) dalam hal ini yakni penataan Desa, perencanaan Desa, Kerja sama yang akan dilaksanakan di Desa, Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta penambahan aset dan pelepasan aset Desa. Masyarakat mengetahui dasar dan informasi program pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa mereka dan turut berpartisipasi dalam program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengoptimalan penggunaan Dana Desa Di Desa Magersari. Disamping hasil musyawarah dapat menyadarkan masyarakat tentang arti penting partisipasi masyarakat, peran pendamping TPID Desa Magersari salah satunya aktif mengiringi proses pemberdayaan sehingga sedikit membawa pengaruh bagi keberdayaan masyarakat. Peran pendamping yang melaksanakan peran utama yaitu fasilitator,

pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran teknis bagi masyarakat yang didampinginya.

3. Bina Lingkungan

Bina lingkungan melalui Program Inovasi Desa yang telah dilaksanakan di Desa Magersari merupakan upaya dalam memberdayakan masyarakat dengan melakukan pelestarian lingkungan hidup dengan memaksimalkan potensi lokal Desa Magersari untuk dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. Bina lingkungan dalam Program Inovasi Desa (PID) meliputi terpenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dahulu, pesisir sungai Bodri sangat kotor dan penuh sampah plastik. Sampah yang selama ini dianggap sebagai masalah dapat diatasi dengan pengelolaan sampah untuk menjadi produk yang dapat menghasilkan rupiah, jadi apabila sampah plastik berkurang maka lingkungan di Desa Magersari juga akan menjadi bersih dan sehat. Selain itu, pemerintah juga melakukan kegiatan pengelolaan sanitasi total berbasis masyarakat melalui penggunaan dana desa, jadi penggunaan dana desa untuk lingkungan lebih efektif dan peka pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data sebelumnya, pemerintah sudah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program inovasi

desa (PID). Hal ini dapat dilihat dari tujuan utama Program Inovasi Desa adalah untuk mendorong pembangunan Desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa sehingga dalam hal ini, upaya ini dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan secara berkelanjutan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian desa. Adapun proses yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Penyadaran

Pada pemberdayaan masyarakat melalui program inovasi desa (PID) tahap penyadaran dimulai dengan sosialisasi kepada pendamping desa (PD) dan pemerintah desa dalam hal ini di hadiri oleh kepala Desa Magersari, Sekretaris desa dan anggota BPD melalui forum musyawarah antar desa (MAD) tahap 1 di aula Kecamatan Patebon. Hasil dari MAD-I di Kecamatan di sampaikan ke pada masyarakat di desa-desa melalui musyawarah desa (MUSDES) yang pelaksanaannya diserahkan pada kebijakan pemerintah desa. Sosialisasi dilakukan tim pelaksana program inovasi desa (TPID) yang telah ditetapkan di masing-masing Kecamatan.

Dari data yang dikumpulkan penulis dapat diketahui bahwa Program Inovasi desa (PID) dapat memberikan penyadaran bahwa dana desa seharusnya lebih terfokus pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan tersedianya sarana prasarana yang dapat menunjang perekonomian warga berarti dapat meningkatkan potensi ekonomi lokal di Desa Magersari.

2. Tahap Pengkapasitasan

Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Pengkapasitasan adalah cara melihat kapasitas pelaku dan pelaksana program inovasi desa (PID). Dalam hal ini peningkatan kapasitas pemerintah desa dan warga Desa Magersari dilaksanakan ketika kegiatan bursa inovasi desa dan pasca bursa inovasi desa. Dalam bursa inovasi desa dilakukan kegiatan tukar menukar pengetahuan atau informasi mengenai inovasi atau ide-ide kegiatan pemberdayaan baik dalam lokal desa maupun dalam tingkat nasional. Bursa Inovasi dilakukan di tingkat Kabupaten yang pada Tahun 2018, kegiatan bursa inovasi desa dilakukan di Desa Sambungsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

Dalam kegiatan pengkapasitasan desa melalui bursa inovasi Desa Magersari melakukan kegiatan komunikasi tentang kebutuhan dan potensi dengan desa lain se-Kabupaten Kendal, permasalahan yang ada di Desa Magersari antara lain,

banyak potensi ekonomi warga yang belum dikelola dengan baik, warga masih bingung dalam mengelola sampah, belum ada saran prasarana pendidikan TK dan Madrasah non formal dan sarana-prasarana olahraga.

Dalam kegiatan bursa inovasi juga diberi arahan dalam menentukan kebijakan dan *problem solving* atau pemecahan masalah atas kebutuhan yang disampaikan oleh perwakilan desa dan ide atau saran pelatihan-pelatihan yang tujuannya meningkatkan ekonomi. Pada pemecahan masalah yang disampaikan oleh TPID antara lain, membangun bak sampah penampungan dan pengadaan sarana prasarana olahraga, peningkatkan kapasitas Guru TK dan Madrasah non formal.

Tahap pemberian kapasitas melalui program inovasi desa (PID) pasca bursa inovasi adalah pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan perekonomian lokal warga. Pemberian kapasitas ini dilakukan dengan memberikan pelatihan usaha kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dalam hal ini adalah ibu rumah tangga yang diberikan pelatihan menjahit, dalam hal ini TPID bekerja sama dengan BLK Kabupaten Kendal. Selain itu, PID juga mengajak kelompok masyarakat pemilik usaha yang memiliki usaha untuk diberikan ketrampilan dalam hal pemasaran produk

Tahap pemberian kapasitas untuk peningkatan sumberdaya manusia oleh TPID di Desa Magersari adalah

dengan pelatihan peningkatan kapasitas kader pembangun manusia (KPM). Anggota KPM yang dipilih dari melalui musdes bertugas untuk membantu pemerintahan desa. KPM diberikan pelatihan agar menjadi pribadi yang memiliki kapasitas dan terlatih dalam membantu pemerinta desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia yang ada di Desa Magersari.

3. Tahap Pendayaan

Tahap ketiga adalah pendayaan. Pendayaan diartikan sebagai peluang daya, kekuasaan yang diberikan pada Masyarakat. Dalam Hal ini PID memberi kekuasaan penuh pada desa untuk memilih kegiatan yang hendak dimasukkan kedalam RAPBDes di Desanya. Desa Magersari di berikan kekuasaan penuh untuk melaksanakan dan mengambil ide atau inovasi yang telah di tawarkan oleh TPID dan menganggarkan kegiatan tersebut dalam APBDes Magersari tahun selanjutnya. Beberapa kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes TA 2019 sebagai hasil dari replikasi inovasi PID pada Tahun 2018 antara lain:

- a) Untuk tahap pendayaan ini, pemerintah desa juga memberikan perhatian bagi pemuda dan karang taruna, melalui kegiatan Program Inovasi Desa (PID) dianggarkan

kegiatan pengadaan sarana-prasarana olahraga dan peningkatan kapasitas karang taruna.

- b) Untuk replikasi inovasi di bidang kesehatan adalah penggunaan dana desa untuk pengadaan posyandu, pengadaan alat-alat kesehatan dan pemberian makanan tambahan sebesar Rp. 30.831.500.
- c) Replikasi inovasi di bidang peningkatan sumberdaya yaitu dengan penyelenggaraan peningkatan kapasitas guru TK dan TPQ.
- d) Replikasi inovasi untuk peningkatan ekonomi lokal dengan penganggaran kegiatan pengembangan BUMdes.
- e) Replikasi inovasi untuk bidang infrastruktur dasar adalah penganggaran kegiatan pembangunan bak sampah untuk pengelolaan sampah terpadu.

Tahap pemberian daya dalam PID selain desa di beri kekuasaan untuk melakukan replikasi pada RAPBDes nya, PID juga memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk mengaspirasikan kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam mengupayakan dirinya serta kesempatan yang diberikan oleh pemerintah desa dalam menyampaikan aspirasinya yang kurang saat ini mulai diaktifkan, berinteraksi dengan masyarakat dengan adanya sosialisasi Program Inovasi Desa kemudian dalam forum musyawarah desa (Musdes) yang

dihadiri oleh seluruh keterwakilan masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi di Desa. Kemudian tim mulai menganalisa permasalahan dan dirumuskan penyelesaian bersama. Disini menekankan partisipasi masyarakat dalam memberikan suara dan pendapat. Dengan semakin meningkatkan interaksi dengan masyarakat, mengajak masyarakat dan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. maka dari itu peran serta masyarakat, kelompok-kelompok usaha, dan nelayan berani menyuarakan apa yang menjadi permasalahan mereka. Dalam pelaksanaannya, proses ini tidak otomatis berjalan, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar baik yang bekerja pendampingan dalam Program Inovasi Desa menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan secara ekonomi

4. Tahap *Networking*

Pada tahap *networking* dapat diketahui bahwa program inovasi desa (PID) membuka jaringan atau informasi melalui bursa inovasi desa. Dalam hal ini desa Magersari mencari contoh-contoh desa yang sama dengan kebutuhan dan permasalahannya.

Berdasarkan data yang di kumpulkan penulis, PID di Desa Magersari juga membuka jaringan untuk masyarakat melalui kerja sama dengan berbagai instansi, seperti balai latihan kerja (BLK) untuk peningkatan kapasitas manusia dan Dinas kesehatan untuk mendukung kegiatan pengadaan posyandu dan posbindu. Sedangkan *networking* untuk bidang peningkatan ekonomi adalah dengan melakukan kerja sama antara kelompok desa dengan swalayan aneka jaya untuk mendistributorkan produk pengolahan sampah menjadi hiasan aquarium. Selain itu, pemerintah desa melalui PID juga mengajak kelompok usaha yang ada di Desa Magersari untuk menjadi kelompok usaha yang berada di bawah naungan BUMdes Berkah Jaya yang ada di Magersari.

5. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi pada PID dilaksanakan oleh Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa yang biasa disebut dengan P2KTD. P2KTD merupakan salah satu komponen dalam PID yang bertugas untuk melengkapi kebutuhan Pendampingan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Desa, membantu desa mewujudkan komitmen replikasi inovasi desa, dan untuk memperkuat kapasitas teknis pemerintah desa dan mempersiapkan Kader Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Tahapan evaluasi di Desa Magersari dilakukan pasca bursa inovasi desa, Musyawarah desa (musdes) penetapan RKPBDes Tahun anggaran 2019 pada Tanggal 5 Juli 2018. P2KTD mengawal komitmen inovasi desa yang telah dipilih di kegiatan bursa inovasi desa kemudian di rumuskan kedalam RAPBDes yang kemudian di tetapkan menjadi APBDes Tahun Anggaran 2019. P2KTD mengawal komitmen inovasi desa yang telah dipilih di kegiatan bursa inovasi desa kemudian di rumuskan kedalam RAPBDes.

Untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di butuhkan metode pemberdayaan, metode yang digunakan-pun tidak cukup hanya dengan satu metode karena dinamika persoalan yang dihadapi masyarakat akan terus berkembang dan dalam penyelesaiannya juga memerlukan metode yang sesuai. Adapun metode yang digunakan oleh program inovasi desa (PID) dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah: *Participatory Rapid And Action (PRA)*, *Partisipatory Learning And Action (PLA)* dan *Forum Group Discussion (FGD)*.

1. Metode PRA (*Partisipatory Rapid And Action*)

Metode PRA digunakan sebagai pendekatan belajar tentang kondisi dan kehidupan masyarakat, yang secara langsung masyarakat dapat berpartisipasi di dalam nya seperti dalam hal perencanaan dan tindakan (Hasim, 2019: 27). Metode PRA merupakan metode awal yang digunakan

oleh TPID untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menggali informasi mengenai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, tujuannya untuk memperoleh rancangan program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan program masyarakat merasa terlibat di dalamnya dan mau untuk berpartisipasi.

TPID Kecamatan Patebon lebih banyak melibatkan warga dan organisasi yang ada di desa-desa kecamatan Patebon, seperti pemerintahan desa, karang taruna, kader pembangunan desa, kelompok masyarakat pemilik usaha, BPD dan warga dengan keterwakilannya untuk perencanaan program dan penentuan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. menurut analisis penulis berdasarkan data yang diperoleh terkait proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh TPID Kecamatan Patebon menggunakan metode ini pada tahap penyadaran kepada masyarakat di desa-desa kecamatan Patebon terkait potensi yang dimiliki dan pelatihan *skill* untuk memanfaatkan potensi tersebut. Dalam pelaksanaannya TPID Kecamatan Patebon juga memperhatikan beberapa hal di awal perencanaan kegiatannya.

- a. Pemetaan wilayah dilakukan dengan melihat letak strategis desa. Dalam hal ini desa Magersari sangat berdekatan dengan sungai bodri dan merupakan desa terkecil di kecamatan Patebon. Desa Magersari juga mempunyai sumber daya yang melimpah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
- b. analisis keadaan yang berupa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam sistem sosial masyarakat dan mencari akar permasalahannya serta mencari alternatif pemecahannya. permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat di desa Magersari adalah banyaknya anak-anak atau pelajar yang putus sekolah, hal ini disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang relatif rendah. Berdasarkan data dari indeks desa mandiri desa Magersari tahun 2019 terdapat 716 jiwa yang berprofesi sebagai nelayan dan buruh nelayan yang pendapatannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Permasalahan yang lain di desa Magersari adalah penggunaan dana desa yang tidak efektif, di mana penggunaannya hanya fokus untuk pembangunan infrastruktur fisik tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

- c. Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak, dilihat dari beberapa jenis industri rumah tangga yang ada di Magersari kemudian dianalisis permasalahannya untuk ditemukan solusi dan dan menjadikan industri rumah tangga tersebut menjadi produk unggulan di desa Magersari. Pengelolaan sampah menjadi hiasan akuarium dan pembuatan miniatur kapal dipilih karena industri tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat dijadikan sebagai produk unggulan di desa Magersari.

2. Metode FGD (*Forum Group Discussion*)

Metode FGD dilakukan untuk mendiskusikan pemahaman atau pengalaman tentang suatu program atau kegiatan yang dipahami, dalam pelaksanaannya metode FGD dibantu oleh seorang moderator. Metode ini dirancang sebagai diskusi kelompok terarah yang melibatkan stakeholder pemangku kekuasaan dan masyarakat setempat. metode ini diterapkan oleh TPID Kecamatan Patebon untuk mendiskusikan beberapa program kegiatan pemberdayaan masyarakat, selain itu metode FGD juga digunakan untuk merumuskan persoalan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan mencari solusinya secara bersama.

Penggunaan metode FGD digunakan oleh TPID pada tahap sosialisasi dan tahap evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Metode FGD digunakan pada tahap sosialisasi PID yang dilaksanakan di di aula Kecamatan Patebon dan di moderatori oleh bapak syafiul Amar selaku ketua TPID, sedangkan penggunaan metode FGD pada tahap evaluasi dilakukan oleh P2KTD kepada masyarakat dan *stakeholder* dengan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan program pemberdayaan.

3. Metode PLA (*Participatory Learning And Action*)

Metode PLA merupakan bentuk metode baru yang dulunya dikenal sebagai *learning by doing* atau belajar sambil bekerja, metode ini digunakan untuk membahas atau mendiskusikan tentang suatu topik atau isu, yang setelah itu akan diikuti aksi nyata (Mardikanto, 2013: 45). Metode PLA digunakan oleh TPID sebagai metode lanjutan setelah FGD, jika metode FGD digunakan untuk perumusan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat dan menentukan solusi yang tepat dan efisien, maka metode pala digunakan untuk aksi nyata TPID. Secara kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Magersari adalah tentang perekonomian dan penggunaan dana desa yang tidak efektif. Kelebihan dari penggunaan metode ini adalah masyarakat memiliki pengetahuan dan

pengalaman yang didapatkan dari pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh TPID, sehingga masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya secara mandiri.

Metode-metode tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, karena dirasa akan sangat kesulitan jika melaksanakan pemberdayaan hanya menggunakan satu metode saja tanpa mengaitkan dengan metode yang lainnya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus tercapai, oleh sebab itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Strategi merupakan suatu proses produksi yang penting dan berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian suatu tujuan (Mardikanto, 2013: 169). Menurut analisis penulis, TPID dalam memberdayakan masyarakat di Desa Magersari menggunakan teori dari Sumaryadi (2005) yaitu *The empowerment approach* yaitu pemberdayaan yang menitik beratkan pada masalah kemiskinan, sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidak berdayaannya. Hal ini dapat dilihat dalam bungkamnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa yang

menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Magersari.

Untuk melihat berhasil atau tidaknya program pemberdayaan bisa dilihat dari keberdayaan masyarakat pada kemampuan peningkatan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan dalam kultur dan politis. ada beberapa indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: (1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin, (2) berkembangnya usaha peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, (3) meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya (4) meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan berkembangnya anggota usaha produktif dan kelompok, (5) meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial nya (Sumodiningrat, 1999: 139). Data yang diperoleh penulis bahwa hasil dari adanya kegiatan pemberdayaan melalui program inovasi desa adalah sebagai berikut:

1. Membuka lapangan pekerjaan, yaitu apabila permintaan produk unggulan banyak akan menyerap banyak pekerjaan.
2. Meningkatnya perekonomian masyarakat yang tergolong kurang sejahtera atau miskin.
3. Meningkatkan kemandirian kelompok usaha untuk mengembangkan usahanya agar dapat menyerap banyak tenaga kerja.
4. Membantu dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa agar dapat digunakan secara efektif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa indikator di atas hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui program inovasi desa di desa Magersari telah memenuhi beberapa indikator keberhasilan di atas. menurut hasil analisis penulis TPID Kecamatan Patebon telah berhasil melakukan kegiatan peningkatan perekonomian dengan pelatihan dan pembekalan *soft skill* untuk masyarakat, pelatihan pemasaran produk, kemudian pemberdayaan untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan memfasilitasi kader pembangunan manusia agar memiliki kapasitas yang baik untuk melayani masyarakat dalam pembangunan desa dan untuk pemberdayaan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar adalah dengan mereplikasi kegiatan hasil dari bursa inovasi desa ke

dalam apbdes tahun berjalan. Dengan kata lain TPID dalam program inovasi desa telah berhasil melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Magersari. Namun kegiatan pemberdayaan dalam program inovasi desa yang dilaksanakan di Kecamatan Patebon masih butuh untuk ditingkatkan dan dikembangkan agar dapat tercapai tujuan dan terciptanya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang efektif dan efisien, karena masih banyak kegiatan yang belum bersifat menyeluruh, dalam arti masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan merasakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

Pemberdayaan adalah sebuah cara proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Mardikanto, 2013:22).

Dalam rangka menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui program inovasi desa (PID) berbagai faktor yang mempengaruhi suatu proses pemberdayaan, ada faktor pendukung

yaitu faktor yang sangat penting dan dibutuhkan demi kelancaran suatu proses pemberdayaan hingga mencapai tujuan awal dari pemberdayaan tersebut. Adapun faktor penghambat yaitu faktor yang menjadi kendala dalam setiap kegiatan pemberdayaan dan faktor ini perlu untuk dicari solusinya guna mengatasi kendala yang ada.

Peneliti di sini menganalisa faktor pendukung dan faktor penghambat dengan menggunakan analisis *Streangths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Threats* (Ancaman) SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini di dasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Streangths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersama dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Setelah Analisis kekuatan, peluang, kelemahan, serta ancaman ini ditemukan diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan *real* suatu pemberdayaan yang sedang berlangsung (Rangkuti, 2006: 19). Adapun analisis faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat melalui PID yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tentu dibutuhkan, guna membantu dan mendorong terlaksananya suatu kegiatan, sehingga kegiatan pemberdayaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sesuai penelitian yang

telah dilakukan oleh penulis faktor pendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program inovasi desa di desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- a) Kreatifitas dan semangat warga atas program pemberdayaan sebagai respon positif dari warga, sehingga adanya motivasi dan dorongan untuk mengikuti kegiatan.
- b) Dukungan dan perhatian penuh dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat.
- c) Peluang untuk masyarakat agar lebih memanfaatkan dana desa (DD) dengan kegiatan yang lebih inovatif.
- d) Peningkatan kapasitas pelaku PID dilaksanakan oleh tim yang profesional dan terlatih agar PID berjalan sesuai tujuan awal.
- e) Dukungan fasilitasi rapat koordinasi, baik itu berjenjang kecamatan maupun kabupaten dan fasilitasi atas kegiatan musyawarah desa (MUSDES) dan musyawarah antar desa (MAD).
- f) Peluang untuk membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja baru, dan peluang untuk memajukan produk unggulan desa.

2. Identifikasi Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan kendala-kendala yang dapat mengakibatkan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat, bahkan bisa jadi gagal. Adanya faktor

penghambat tentu disebabkan oleh beberapa hal baik itu dari masyarakat, potensi sumber daya dari daerah itu sendiri maupun dari lembaganya. Jika hal tersebut sudah terjadi tentunya sangat perlu untuk dicarikan solusi dan upaya penanganan kendala kendala tersebut. Adapun sesuai penelitian yang telah dilakukan oleh penulis faktor penghambat kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program inovasi desa di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan pemerintah Desa Magersari yang masih terfokus pada pembangunan infrastruktur, seperti rabat beton, pavingisasi dan pembangunan talud tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat akan kesejahteraan dan pemberdayaan.
- b) Proses sosialisasi kegiatan Program Inovasi Desa (PID) kepada pemerintah desa berjalan sangat singkat.
- c) Terdapat beberapa perbedaan atau perubahan pengaturan maupun konsep PID.
- d) Keterbatasan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan teknis PID di Desa Magersari.

3. Matriks Analisis SWOT

Berdasarkan hasil identifikasi di atas, analisis SWOT dari faktor pendukung dan penghambat yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 5

Faktor	Eksternal	Internal
	Peluang	Kekuatan
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peluang untuk masyarakat agar lebih memanfaatkan dana desa (DD) dengan kegiatan yang lebih inovatif. 2. Pelaku PID dilaksanakan oleh tim yang profesional dan terlatih. 3. Peluang untuk membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja baru, dan peluang untuk memajukan produk unggulan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon positif dari warga sehingga adanya motivasi dan dorongan untuk mengikuti kegiatan. 2. Dukungan dan perhatian penuh dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat. 3. Dukungan fasilitasi rapat koordinasi.
	Ancaman	Kelemahan
Penghambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat beberapa perbedaan atau perubahan pengaturan maupun konsep PID. 2. Keterbatasan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan teknis PID. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah Desa Magersari yang masih terfokus pada pembangunan infrastruktur. 2. Proses sosialisasi kegiatan Program Inovasi Desa (PID) kepada pemerintah desa berjalan sangat

		singkat.
--	--	----------

Analisis SWOT faktor penghambat dan pendukung Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan pengamatan, terhadap pelaksanaan program inovasi desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat melalui program inovasi desa (PID) di Desa Magersari dapat disimpulkan bahwa terdapat lima tahapan yaitu :
 - a) Tahap penyadaran, Pada pemberdayaan masyarakat melalui program inovasi desa (PID) tahap penyadaran dimulai dengan sosialisasi kepada pendamping desa (PD) dan pemerintah desa dalam hal ini di hadiri oleh kepala Desa Magersari, Sekretaris desa dan anggota BPD melalui forum musyawarah antar desa (MAD) tahap 1 di aula Kecamatan Patebon. Hasil dari MAD-I di Kecamatan di sampaikan ke pada masyarakat di desa-desa melalui musyawarah desa (MUSDES) yang pelaksanaannya diserahkan pada kebijakan pemerintah desa. Sosialisasi dilakukan tim pelaksana program inovasi desa (TPID) yang telah ditetapkan di masing-masing Kecamatan. pada tahap ini TPID memberikan gambaran bahwa kegiatan pembangunan di desa tidak hanya kegiatan yang bersifat infrastruktur saja, akan

tetapi ada kegiatan yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa.

- b) Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Pengkapasitasan adalah cara melihat kapasitas pelaku dan pelaksanaa program inovasi desa (PID). Dalam hal ini peningkatan kapasitas pemerintah desa dan warga Desa Magersari dilaksanakan ketika kegiatan bursa inovasi desa dan pasca bursa inovasi desa. Dalam bursa inovasi desa dilakukan kegiatan tukar menukar pengetahuan atau informasi mengenai inovasi atau ide-ide kegiatan pemberdayaan baik dalam lokal desa maupun dalam tingkat nasional. Bursa Inovasi dilakukan di tingkat Kabupaten yang pada Tahun 2018, kegiatan bursa inovasi desa dilakukan di Desa Sambungsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.
- c) Tahap ketiga adalah pendayaan., pada tahap pendayaan PID memberi kekuasaan penuh pada desa untuk memilih kegiatan yang hendak dimasukkan kedalam RAPBDes di Desanya. Desa Magersari di berikan kekuasaan penuh untuk melaksanakan dan mengambil ide atau inovasi yang telah di tawarkan oleh TPID dan menganggarkan kegiatan tersebut dalam APBDes Magersari tahun selanjutnya. Beberapa kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes TA 2019. Tahap pemberian daya dalam PID selain desa di beri kekuasaan untuk melakukan replikasi pada RAPBDes nya, PID juga memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk

mengaspirasikan kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam mengupayakan dirinya serta kesempatan yang diberikan oleh pemerintah desa dalam menyampaikan aspirasinya yang kurang saat ini mulai diaktifkan, berinteraksi dengan masyarakat dengan adanya sosialisasi Program Inovasi Desa kemudian dalam forum musyawarah desa (Musdes).

- d) Tahap *networking*, program inovasi desa (PID) membuka jaringan atau informasi dengan desa lain melalui bursa inovasi desa. PID di Desa Magersari juga membuka jaringan untuk masyarakat melalui kerja sama dengan berbagai instansi, seperti balai latihan kerja (BLK) untuk peningkatan kapasitas manusia dan Dinas kesehatan untuk mendukung kegiatan pengadaan posyandu dan posbindu. Sedangkan *networking* untuk bidang peningkatan ekonomi adalah dengan melakukan kerja sama antara kelompok desa dengan swalayan aneka jaya untuk mendistributorkan produk pengolahan sampah menjadi hiasan aquarium. Selain itu, pemerintah desa melalui PID juga mengajak kelompok usaha yang ada di Desa Magersari untuk menjadi kelompok usaha yang berada di bawah naungan BUMdes Berkah Jaya yang ada di Magersari.
- e) Tahap evaluasi oleh PID di Desa Magersari dilakukan pasca bursa inovasi desa, yang dilaksanakan oleh P2KTD pada Musyawarah desa (musdes) penetapan RKPBDes Tahun

anggaran 2019 pada Tanggal 5 Juli 2018. P2KTD mengawal komitmen inovasi desa yang telah dipilih di kegiatan bursa inovasi desa kemudian di rumuskan kedalam RAPBDes. P2KTD merupakan salah satu komponen dalam PID yang bertugas untuk melengkapi kebutuhan Pendampingan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Desa, membantu desa mewujudkan komitmen replikasi inovasi desa, dan untuk memperkuat kapasitas teknis pemerintah desa dan mempersiapkan Kader Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program inovasi desa (PID) di Desa Magersari antara lain:
 - a) Faktor pendukung, yaitu, dukungan dan perhatian pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, Peluang untuk masyarakat agar lebih memanfaatkan dana desa dengan kegiatan yang lebih inovatif, peningkatan kapasitas pelaku PID, dukungan fasilitasi rapat koordinasi, adanya respon positif masyarakat.
 - b) Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui PID yaitu, Proses sosialisasi informasi dan inovasi PID sangat singkat, kebijakan pemerintah Desa Magersari yang masih terfokus pada pembangunan infrastruktur, Keterbatasan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan teknis PID di Desa

Magersari, Minimnya alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Magersari.

Kegiatan PID hadir sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-inovasi pembangunan desa serta merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal.

B. SARAN

Terkait dengan penelitian yang dilakukan, saran yang di sampaikan peneliti kepada pemerintah Desa Magersari antara lain:

1. Untuk pemerintah Desa Magersari Hendaknya lebih memfokuskan penggunaan dana desa untuk kepentingan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk pemerintah Desa Magersari agar lebih memperhatikan potensi-potensi yang ada di Desa Magersari dan melestarikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Dasar Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Abdul Majid, 2013. *Strategi Pembelajaran*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ayundari Ratna. 2015. “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Kelompok Bhkati Manunggal di Dusun Tulung Desa Srihardono Pundong Bantul Yogyakarta*”. Skripsi fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
- Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Magersari Tahun anggaran 2018.
- Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Magersari Tahun anggaran 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quraan dan Terdjemahnja*, (Jakarta, JAMUNU, 1969)
- Freddy Rangkuti. 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT. Graha Pustaka Utama.
- George Ritzer. 2004. Edisi Terbaru Teori Sosiologi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2011. Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Bantul: Kreasi Wacana.
- George Ritzer. 2010. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hayati, Fatimah Zahrotul . 2015. “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Vokasi di Kelurahan Kedungsari Kecamatan*

Magelang Utara Kota Magelang” Skripsi: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN.

Hendra, Tomi. 2017. *Jurnal Hikmah, volume 11 nomor 2, desember 2017*. Bukit Tinggi: fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Diakses pada 01 Desember 17:57.

Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.

Idrus, Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: Erlangga.

Ife, Jim. 2008. Et.al “*community development ; alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Isbandi Rukminto Adi. 2008. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2005.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta.

Kuntjojo. 2009. “*Metode Penelitian*”. Kediri: Universitas PGRI.

Margono, S. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Maulida, Yuyun. 2018. *Efektivitas Program Inovasi Desa Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

BAPPENAS. 2017. *Membedah Angka Kemiskinan dan Kesenjangan: Rilis data terkini*.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Muslim Aziz. 2012. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Samudra Biru.
- Munjazi, Syukron. 2009. “*Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengurangi kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri) (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)*”.Skripsi: Fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
- Nurhuda, Muhammad Ufik. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Program CSR (Corporate Socail Responsibility) PT Pertamina DPPU Adi Sutjipto di Dusun Nayan Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta*. Skripsi: Fakultas Dakwah IAIN Surakarta.
- Petunjuk teknik operasional pelaksanaan PID Tahun 2018.
- Peter Hamilton. 1990. *Talcot Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Pupu, Saeful Rahmat. 2009. “Penelitian Kualitatif”, dalam *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol.5, No.9. Diakses pada 15 Maret 2018.
- Rahmat Jalaludin. 1998. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Richard Grathoff. 2000. *Kesesuaian antara Alferd Schutz dan Talcott Parsons: Teori Aksi Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Rislima F. Sitompul. 2009. *Merancang Model pengembangan masyarakatPedesaan dengan Pendekatan System Dynamics*. Jakarta: LIPI Press.
- Robert M.Z. Lawang. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- R Wrihatnolo Randy dkk. 2006. *Managemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komutindo.
- Salinan Kemdendesa PDTT No. 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Inovasi Desa (PID)

- Sawitri, Dewi. 2004. "Profesi Perencanaan Dalam Perencanaan Partisipatif Suatu Kajian Teori dan Praktek Perencanaan", dalam *Jurnal Kesehatan*, No 23 a, Di akses pada Januari 2019.
- Sitompul F, Rislina. 2009. *Merancang Mode Pengembangan Masyarakat Pedesaan dengan Pendekatan Sistem Dynamics*. Jakarta: LIPI Press.
- Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) (Diunduh pada 26 Nopember 2019)
- Soetomo, 2013, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama.
- Supriatna, Asep. 2014. "Relevansi Metode Participatory Rural Appraisal dalam Mendukung Implementasi Undang- Undang Pemerintahan Desa", dalam *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Vol. 1, No.1. Di akses pada 3 Desember 2018.
- Sutisna, Endang,dkk. 2015. "Aplikasi Model Precede-Proceed pada Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Berbasis Penilaian Kebutuhan
- Theresia , Aprilia. 2014. Et.al "pembangunan berbasis masyarakat". Bandung : Alfabeta.
- Kesehatan Masyarakat", dalam *Jurnal Kedokteran Yasri*. Vol.23, No. 3. Di akses pada Januari 2019.
- Tonny Nasdian, Fredian. 2015. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Totok, Poerwoko. 2013.*Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: ALFABETA.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta: Prenadamedia group.

Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayat selaku tim program inovasi desa (TPID) Kecamatan Patebon Kabupate Kendal Pada Hari Jum'at, 15 Nopember 2019.

Wawancara dengan Bapak Andien selaku pendamping lokal desa (PLD) Kecamatan Patebon pada Hari Jumat, 3 Mei 2019

Wawancara dengan Ibu Syahadah Isma, Selaku pendamping desa (PD) Desa Magersari pada hari Kamis, 14 Nopember 2019.

Wawancara dengan Bapak Muhyidin selaku Kepala Desa Magersari Pada Hari Kamis, 14 Nopember 2019:

Wawancara dengan Bapak Basit selaku sekretaris Desa Magersari Pada Hari Kamis, 14 Nopember 2019.

Wawancara dengan Bapak Suratman selaku anggota BPD Desa Magersari dan pelaku usaha kelompok masyarakat pada Hari Kamis, 14 Nopember 2019

Wawancara dengan Ibu Ma'in selaku kader pembangun manusia (KPM) di Desa Magersari pada Hari Jum'at, 20 Desember 2019

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEBON
KEPALA DESA MAGERSARI**

Alamat : Jalan Raden Patah Km. 03 – Magersari Kode Pos : 51351

Nomor : 141.1/523 /XII/ 2019
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

Magersari, 14 November 2019

Kepada Yth ;
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat.**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Abdul Basit Mutohirin
Jabatan : Sekretaris Desa Magersari

Bertindak atas nama Kepala Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :

Nama : Siti Ani Munasaroh
NIM : 1501046002
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Telah melakukan riset penggalian data di desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul Pembedayaan Masyarakat melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

a.n. KEPALA DESA MAGERSARI
SEKRETARIS DESA MAGERSARI



MUHAMMAD ABDUL BASIT MUTOHIRIN



PROGRAM
INOVASI
DESA

TIM PELAKSANA INOVASI DESA KECAMATAN PATEBON

Sekretariat : Jalan Soekarno-Hatta No. 103 Patebon 51351 Kabupaten Kendal

SURAT KETERANGAN

Nomor: 8 / TPID - PTB / XI / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID)
Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal menerangkan:

Nama : Siti Ani Munasaroh

NIM : 1501046002

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Bahwa nama di atas telah melaksanakan kegiatan riset lapangan untuk penelitian skripsi yang berjudul "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal*" selama 2 Bulan terhitung sejak Bulan Oktober dan Nopember 2019"

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Patebon, 14 Nopember 2019

TPID Kecamatan Patebon

(Saiful Amar S.T)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Siti Ani Munasaroh

NIM : 1501046002

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 23 Nopember 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Pucang Jono Desa Jono RT/RW:
01/08 Kecamatan Tawangharjo Kabupaten
Grobogan

E-mail : Dezaani21@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita Desa Jono
2. SD N 3 Jono
3. MTS Puteri Sunniyyah Selo
4. MAN 1 Purwodadi
5. UIN Walisongo Semarang

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 3 Desember 2019

Siti Ani Munasaroh
1501046002